



PEMERINTAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RENSTRA

(Rencana Strategis)

2025-2029

Dinas Lingkungan Hidup
Dan Kehutanan (DLHK)
Provinsi
Kepulauan Riau

2025



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 dapat tersusun.

Secara terperinci, penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan sistematika penyajiannya mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi serangkaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang digunakan, serta implementasinya dalam rencana program dan kegiatan, serta akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan, sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan Riau.

Kami menyadari bahwa materi Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon masukan dan koreksi dari semua pihak. Kami berharap materi Renstra ini dapat dipergunakan dan diimplementasikan secara proporsional serta konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kepala DLHK

Provinsi Kepulauan Riau

Hendri, S.T.

NIP. 19710501 200312 1 008

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar.....	vi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	9
1.4. Sistematika Penulisan	9
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN	
DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	11
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	11
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur DLHK Provinsi Kepulauan Riau.....	11
2.1.2. Sumber Daya DLHK Provinsi Kepulauan Riau	19
2.1.3. Kinerja Pelayanan DLHK Provinsi Kepulauan Riau.....	28
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan DLHK Provinsi Kepulauan Riau	36
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan	37
2.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	38
2.1.7. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah.....	38
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	38
2.2.1. Permasalahan Pelayanan DLHK Provinsi Kepulauan Riau.....	38
2.2.2. Isu Strategis DLHK Provinsi Kepulauan Riau	39

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	49
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra DLHK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029	49
3.2. Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra DLHK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029	55
3.3. Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra DLHK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029	59
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	62
4.1. Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan.....	62
4.1.1 Uraian Program, Kegiatan, Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif.	62
4.1.2 Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah	180
4.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra DLHK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	182
4.3. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	182
BAB V PENUTUP	185
5.1. Kesimpulan Substansial	185
5.2. Kesimpulan Sesuai Kaidah Pelaksanaan	185
5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan.....	186

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Distribusi Aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau	20
Tabel 2.2	Tingkat Pendidikan Aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	21
Tabel 2.3	Jumlah SDM Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan.....	21
Tabel 2.4	Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	22
Tabel 2.5	Evaluasi Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Urusan yang Menjadi Tanggung Jawab DLHK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026	34
Tabel 2.6	Perumusan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.....	40
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra DLHK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029	52
Tabel 3.2	Strategi Renstra DLHK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029	56
Tabel 3.3	Penetapan Renstra DLHK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029	59
Tabel 3.4	Arah Kebijakan Renstra DLHK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029	59
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	63
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan Pendanaan DLHK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.....	132
Tabel 4.3	Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	181
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama DLHK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029	182
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci DLHK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029	183

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya.....	4
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.....	13
Gambar 2.2	IKLH Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024	29
Gambar 2.3	Indeks Kualitas Air Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024.....	29
Gambar 2.4	Indeks Kualitas Udara Ambien Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024	31
Gambar 2.5	Indeks Kualitas Lahan (IKL) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024	31
Gambar 2.6	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024	31
Gambar 2.7	Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	33
Gambar 3.1	Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan	50

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik (sesuai dengan visi dan misi daerah) yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah untuk mencapai hal tersebut. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk mengarahkan pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan pada masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Berdasar hal tersebut, Renstra Perangkat Daerah sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

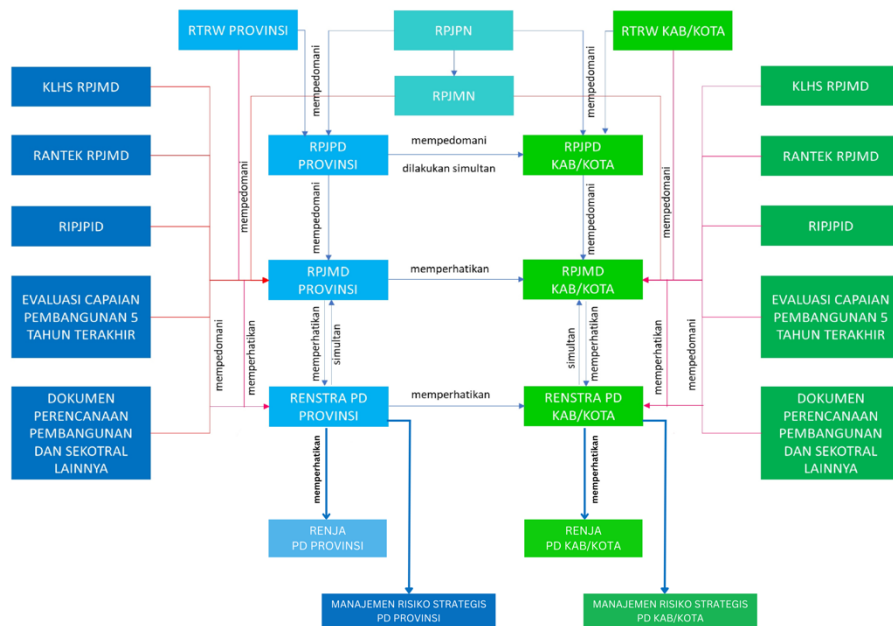
Amanat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Indikatif berarti program atau kegiatan masih berfungsi sebagai acuan awal yang memberikan arah dalam proses perencanaan pembangunan, namun tetap memungkinkan adanya penyesuaian dengan dinamika dan kebutuhan yang muncul selama proses perencanaan dan pelaksanaan.

Secara terperinci, penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan sistematika penyajiannya mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Sebagai dokumen perencanaan, Renstra harus disusun berdasarkan pada program dan kegiatan yang terencana, terukur, dan diharapkan dapat memenuhi kehendak, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat atau *stakeholders*. Penyusunan Renstra PD dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. **Persiapan Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029.** Pada tahap ini dilakukan Pelaksanaan orientasi penyusunan Renstra PD; Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra PD; Analisis data evaluasi hasil pembangunan 5 (lima) tahun terakhir; Inventaris data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lainnya; dan Hal-hal yang diperlukan dalam proses penyusunan Renstra PD.
2. **Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renstra PD Tahun 2025-2029.** Pada tahap ini dilakukan penyusunan Pendahuluan; Gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis perangkat daerah; Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan; Program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan Penutup.
3. **Penyusunan Rancangan Renstra PD.** Pada tahap ini Bappeda menyampaikan surat edaran Kepala Daerah kepada kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan Ranwal RPJMD. Selanjutnya Perangkat Daerah melakukan Penyusunan Rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029 yang merupakan proses penyempurnaan Ranwal Renstra PD Tahun 2025-2029 menjadi Rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029 berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Rancangan Renstra PD.
4. **Forum PD/Lintas PD.** Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD dikoordinasikan oleh Bappeda dengan pendekatan tematik yang melibatkan PD terkait. Forum PD/Lintas PD dilaksanakan untuk menyepakati keluaran (output) utama Renstra PD, termasuk keluaran (output) untuk melaksanakan program kepala daerah, dan keterhubungan keluaran (output antar-Renstra PD dalam mencapai kinerja hasil (outcome) tematik pembangunan. Forum PD/Lintas PD Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi PD, seperti: pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, akademisi, asosiasi usaha, lembaga swadaya masyarakat, perwakilan/kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak, dan pemangku kepentingan terkait; dan Hasil Forum PD/Lintas PD Tahun 2025-2029 dirumuskan dalam berita acara kesepakatan Forum PD/Lintas PD dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum PD/Lintas PD.
5. **Verifikasi Rancangan Renstra PD.** Pada tahap ini Perangkat daerah melakukan penyempurnaan Ranwal Renstra PD menjadi Rancangan Renstra PD berdasarkan berita acara kesepakatan Forum PD/Lintas PD. Setelah pelaksanaan Forum PD/Lintas Perangkat Daerah, kepala PD menyampaikan Rancangan Renstra PD kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi. Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan

mengakomodasi hasil Berita Acara Forum PD/Lintas PD. Perangkat daerah menyempurnakan Rancangan Renstra PD berdasarkan hasil verifikasi Bappeda. Rancangan Renstra PD yang telah disempurnakan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

6. **Perumusan Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029.** Perumusan Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029 menjadi Rankhir Renstra PD berdasarkan Perda tentang RPJMD Tahun 2025-2029. Perumusan Rankhir Renstra PD dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program/kegiatan/ subkegiatan PD berdasarkan strategi, arah kebijakan, program prioritas yang ditetapkan dalam Perda tentang RPJMD.
7. **Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rankhir Renstra Tahun 2025-2029.** Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 direviu oleh APIP. Hasil Reviu APIP terhadap Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029 disampaikan kepada Perangkat Daerah; dan Perangkat Daerah menyempurnakan Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029 berdasarkan Hasil Reviu APIP.
8. **Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD.** Pada tahap ini Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Akhir Renstra PD yang telah disempurnakan berdasarkan Hasil Reviu APIP kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi sebelum ditetapkan; Verifikasi harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, program, kegiatan, dan subkegiatan pada Rancangan Akhir Renstra PD sudah selaras dengan Perda RPJMD Tahun 2025-2029. Apabila hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) tersebut di atas, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
9. **Penetapan Renstra PD Tahun 2025-2029.** Pada tahap ini, Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029 yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda untuk dilakukan proses penetapan Renstra PD. Bappeda menyampaikan Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029 yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Penetapan Perkada Renstra PD Tahun 2025-2029 paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan.



Gambar 1.1. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Seiring dengan disusunnya RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, maka Perangkat Daerah termasuk DLHK Provinsi Kepulauan Riau wajib menyusun Renstra PD Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada RPJMD tersebut, dan memperhatikan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih, Renstra Kementerian/Lembaga, Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau agar sesuai dan sejalan dengan Kebijakan dan Arah Pembangunan Nasional dan Daerah. Penyusunan Renstra DLHK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 juga mempertimbangkan isu-isu daerah dan nasional, utamanya yang berkaitan dengan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Renstra DLHK Provinsi Kepulauan Riau memiliki kedudukan yang sangat penting karena akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) DLHK. Renja merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025-2029, dan akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan wajib melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan

(BAPPEDA) Provinsi Kepulauan Riau dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka Penyusunan Renstra DLHK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Peraturan Perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
 20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7);

23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 39);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 60);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2023-2050;
29. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3).
31. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909).
32. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 44 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Sebagai penjabaran atas RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2029, sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.
2. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu 5 tahun (2025-2029).

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau setiap tahunnya.
3. Sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) DLHK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang Latar belakang, Dasar hukum penyusunan, Maksud dan tujuan, dan Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, berisi tentang Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, meliputi: Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah; Sumber daya Perangkat Daerah; Kinerja pelayanan Perangkat Daerah, Kelompok sasaran layanan, Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada), Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah (apabila ada), dan Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah (apabila ada), dan Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, meliputi: Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dan Isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, berisi tentang Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029; Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARMN BIDANG URUSAN, berisi tentang Uraian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP, berisi tentang kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur DLHK Provinsi Kepulauan Riau

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan mandat dari Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pelaksanaan tugas-tugas yang dimandatkan dalam Perda tersebut dipertegas melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023, khususnya pada Pasal 196 menyebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Guna menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengolahan sampah, Limbah B3 dan Kajian Dampak Lingkungan, Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan, Konservasi Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Unit Pelaksana Teknis Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengolahan sampah, Limbah B3 dan Kajian Dampak Lingkungan, Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan, Konservasi Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Unit Pelaksana Teknis Daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengolahan sampah, Limbah B3 dan Kajian Dampak Lingkungan, Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan,

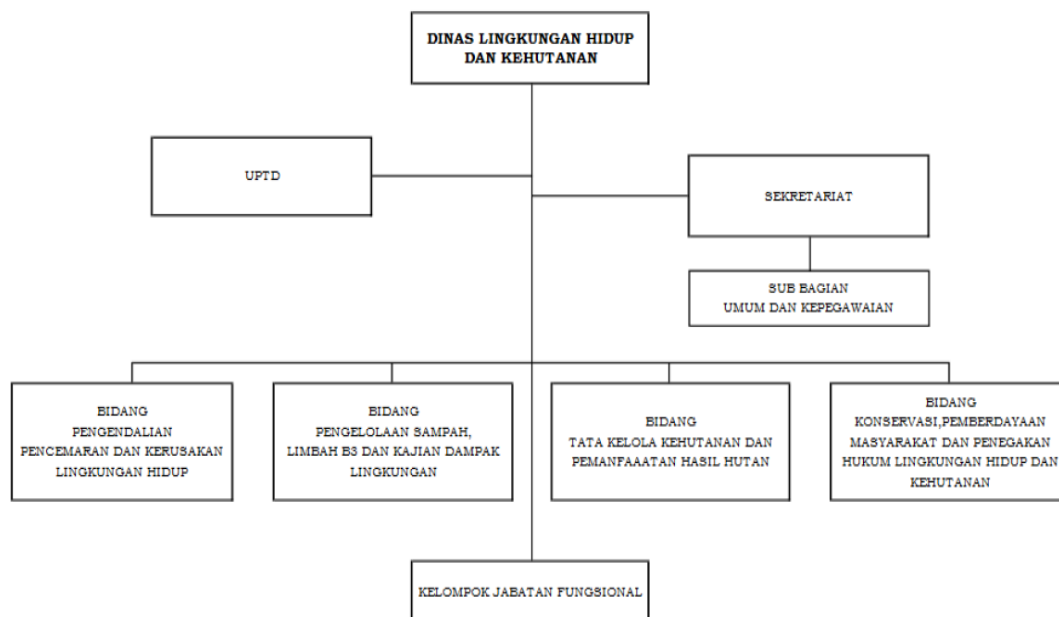
- Konservasi Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Unit Pelaksana Teknis Daerah;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengolahan sampah, Limbah B3 dan Kajian Dampak Lingkungan, Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan, Konservasi Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 5. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
 6. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
 7. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Kajian Dampak Lingkungan.
5. Bidang Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan.
6. Bidang Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat, Penegakan Hukum Lingkungan hidup dan Kehutanan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TIPE A
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

LAMPIRAN XVII : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 12 TAHUN 2023
TANGGAL : 12 JUNI 2023



Sumber: Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana gambar di atas, menunjukkan bahwa Perangkat Daerah tersebut memiliki 4 bidang dan 1 Sekretariat, serta 1 kelompok jabatan fungsional tertentu. Struktur tersebut telah sesuai dengan kebutuhan organisasi yang bergerak dalam urusan kehutanan dan pengelolaan lingkungan hidup. Semua program dan kegiatan telah tertampung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang/bagian dalam mencapai target kinerja organisasi. Berikut uraian tugas dan fungsi yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

1. Sekretariat

Sekretariat terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik

negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala Perangkat Daerah mengkoordinasikan Bidang-bidang. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian.
- 2) Pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah
- 3) penyiapan bahan dan pengoordinasian perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang perangkat daerah;
- 4) penyiapan bahan dan pengoordinasian perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang perangkat daerah;
- 5) penyiapan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
- 6) penyiapan bahan-bahan terkait ketatalaksanaan; penyiapan bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan,
- 7) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup Perangkat Daerah;
- 8) penyiapan bahan pelaporan keuangan perangkat daerah;
- 9) pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- 10) pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja perangkat daerah;
- 11) pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- 12) pelaksanaan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;
- 13) penyiapan bahan pelaporan keuangan perangkat daerah;
- 14) penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
- 15) penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah;
- 16) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait pengendalian pencemaran lingkungan hidup, pengendalian kerusakan dan pemeliharaan lingkungan hidup dan inventarisasi RPPLH dan KLHS. Dalam melaksanakan tugas

dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pengendalian pencemaran lingkungan hidup, pengendalian kerusakan dan pemeliharaan lingkungan hidup dan inventarisasi RPPLH dan KLHS.
- 2) pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, pesisir dan laut;
- 3) pelaksanaan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- 4) pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan, penanggulangan kerusakan lingkungan, dan pemulihan kerusakan lingkungan;
- 5) pelaksanaan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan secara lestari, dan pencadangan sumber daya alam;
- 6) pelaksanaan upaya mitigasi, adaptasi perubahan iklim, inventarisasi GRK, penyusunan profil emisi GRK, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- 7) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM, penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan, sinkronisasi RLPLH Nasional dan Ekoregion;
- 8) pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS dan pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- 9) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- 10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Kajian Dampak Lingkungan

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan sampah, pengelolaan limbah B3, dan Kajian Dampak Lingkungan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Dan kajian Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pengelolaan sampah, pengelolaan limbah B3, dan Kajian Dampak Lingkungan.
- 2) pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional, pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus;
- 3) pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3, perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi, perizinan penimbunan limbah B3 dilakukan lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi, pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- 4) penyiapan sarana prasarana pengolahan sampah dan pengolahan limbah B3;
- 5) pelaksanaan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis risiko LH);
- 6) pelaksanaan Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL) dan proses izin lingkungan;
- 7) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan

Bidang Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Tata hutan dan penggunaan kawasan hutan, pengelolaan hasil hutan, pemasaran dan PNBP, dan pemanfaatan kawasan hutan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Tata hutan dan penggunaan kawasan hutan,

pengelolaan hasil hutan, pemasaran dan PNBP, dan pemanfaatan kawasan hutan.

- 2) penyiapan bahan koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi terhadap penatagunaan hutan, penyusunan, pelaksanaan rencana pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh KPHP dan atau KPHL;
- 3) penyiapan bahan pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan, kelembagaan KPH serta sistem informasi tata hutan KPHP dan atau KPHL;
- 4) penyiapan bahan penyusunan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi;
- 5) penyiapan bahan pemberian perubahan status, fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi ;
- 6) penyiapan bahan penilaian dan evaluasi perizinan industri primer hasil hutan bukan kayu dengan kapasitas produk < 6000 m³/tahun, dan perizinan industri primer hasil hutan bukan kayu di wilayah Provinsi;
- 7) penyiapan bahan pengendalian, pengawasan sumber bahan baku, penatausahaan, peredaran pengolahan hasil hutan kayu dari industri primer hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu di wilayah Provinsi;
- 8) penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di Provinsi;
- 9) penyiapan bahan penilaian dan evaluasi perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
- 10) penyiapan bahan pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
- 11) penyiapan bahan pemberian teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah Provinsi;
- 12) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- 13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat, Penegakan Hukum Lingkungan hidup dan Kehutanan

Bidang Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan DAS, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, pemberdayaan masyarakat dan penyuluhan, dan perlindungan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pengelolaan DAS, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, pemberdayaan masyarakat dan penyuluhan, dan perlindungan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- 2) penyiapan bahan penyusunan, penetapan rencana, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
- 3) penyiapan bahan pembentukan forum pengelolaan DAS, Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS, dan pembangunan sistem informasi pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
- 4) penyiapan bahan rencana Pengelolaan Rehabilitasi di Lahan (RPRL) dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) di luar Kawasan hutan negara dan pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar Kawasan hutan negara di wilayah Provinsi;
- 5) penyiapan bahan pelaksanaan rehabilitasi lahan melalui penghijauan, penerapan teknik konservasi tanah dan air, serta rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir di wilayah Provinsi;
- 6) pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan di bidang kehutanan;
- 7) penyiapan bahan penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan, penyusunan program dan materi penyuluhan di bidang kehutanan;
- 8) penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan;
- 9) penyiapan bahan pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha;

- 10) penyiapan bahan fasilitasi dan pendampingan pengusulan penetapan areal kerja perhutanan sosial dan pengembangan perhutanan sosial (HKm, HTR, HD, dan kemitraan) dan penyusunan dan penetapan rencana kerja kegiatan perhutanan sosial;
- 11) pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan, izin perlindungan, pengelolaan lingkungan dan kehutanan, pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan, izin perlindungan, pengelolaan lingkungan, pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- 12) pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup, penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- 13) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- 14) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.2 Sumber Daya DLHK Provinsi Kepulauan Riau

1. Kepegawaian

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau memiliki pegawai dengan 2 kelompok yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jumlah keseluruhan pegawai yang bertugas di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 193 orang. Jumlah pegawai tersebut terdiri dari PNS sebanyak 138 orang, P3K sebanyak 47 orang, P3K Tahap II sebanyak 6 orang, dan paruh waktu sebanyak 2 orang.

Distribusi pegawai di Kantor Dinas dan juga di Unit Pelaksana Teknis sebagai berikut:

Tabel 2.1
Distribusi Aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Kepegawaian	ASN					Total
		PNS		PPPK		Paruh waktu	
		PNS	POLHUT	P3K	P3K Tahap II		
1	Kepala Dinas	1	0	0	0	0	1
2	Sekretariat	11	0	11	3	0	25
3	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	10	0	4	1	0	15
4	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Kajian Dampak Lingkungan	11	0	9	0	0	20
5	Bidang Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan	9	0	2	0	0	11
6	Bidang Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat, Penegakan Hukum Lingkungan hidup dan Kehutanan	8	4	2	0	0	14
7	UPT Laboratorium	7	0	6	1	0	14
8	UPTD KPHP Batam	8	5	6	1	1	21
9	UPTD KPHP Karimun	6	3	2	0	0	11
10	UPTD KPHP Lingga	9	3	2	0	1	15
11	UPTD KPHP Natuna	9	3	2	0	0	14
12	UPTD KPHP Tanjungpinang - Bintan	7	6	1	0	0	14
13	UPTD KPHP Anambas	3	15	0	0	0	18
Jumlah		99	39	47	6	2	193

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, 2025.

Jika dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai yang bekerja di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, maka dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2

**Tingkat Pendidikan Aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025**

No	Tingkat Pendidikan	ASN				Total
		PNS	PPPK		Paruh Waktu	
			P3K	P3K Tahap II		
1	S3/Doktor	-	0	0	0	0
2	S2/Master	16	0	0	0	16
3	S1/Sarjana	67	21	2	0	90
4	D3/Sarjana Muda	6	4	1	0	11
5	SMA/ sederajat	49	18	3	2	72
6	SMP/ sederajat	-	2	0	0	2
7	SD/ sederajat	-	2	0	0	2
8	Tidak Tamat SD	-	0	0	0	0
	Jumlah	138	47	6	2	193

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, 2025.

Berikut informasi pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan jenis kelamin dan golongan.

Tabel 2.3

**Jumlah SDM Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau
Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan Tahun 2025**

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	IV/c (Pembina utama muda)	1	0	1
2	IV/b (Pembina Tk.I)	3	0	3
3	IV/a (Pembina)	10	1	11
4	III/d (Penata Tk.I)	25	17	42
5	III/c (Penata)	12	4	16
6	III/b (Penata muda Tk.I)	11	7	18
7	III/a (penata muda)	15	4	19
8	II/d (Pengatur Tk.I)	16	6	22
9	II/c (Pengatur)	5	0	5
10	II/b (Pengatur muda Tk.I)	0	0	0
11	II/a (Pengatur muda)	1	0	1
12	P3K Tahap I	30	17	47
13	P3K Tahap II	3	3	6
14	P3K Paruh Waktu	2	0	2
	Jumlah	134	59	193

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, 2025.

2. Sarana dan Prasarana Pendukung

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk mendukung terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Sarana dan Prasarana yang ada terdiri atas bangunan kantor dinas, bangunan Kantor UPT yang tersebar di 7 kabupaten/kota. Selain bangunan, DLHK Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki Laboratorium Lingkungan yang berada di Sekupang Kota Batam. Tersedia juga kendaraan roda 2, 4, dan 6, alat bengkel, kebun, jalan hutan, alat kantor dan rumah tangga, serta alat studio dan komunikasi. Secara umum, kondisi sarana dan prasarana yang ada di lingkungan dinas sudah cukup baik.

Tabel 2.4

**Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Kepulauan Riau**

No	Jenis Sarana & Prasarana	Jumlah	Keterangan/Kondisi Barang
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.545 m ²	Jalan Pramuka no 7B sei harapan sekupang Batam
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.000 m ²	PASIR PANJANG SEMEMAL
3	Dump Truck	6	Baik
4	Pompa Air	2	Baik
5	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN (mobil)	9	Baik
6	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG (pick up)	5	Baik
7	Sepeda Motor	60	Baik
8	Motor Listrik	3	Baik
9	Speed Boat / Motor Tempel	3	Baik
10	Gergaji Chain Saw	1	Baik
11	Filling Dvice	3	Baik
12	Rol Meter	2	Baik
13	PH Meter (Alat Ukur Universal)	2	Baik
14	Global Positioning System	43	Baik
15	Scanner (Universal Tester)	1	Baik
16	Termometer Standar	1	Baik
17	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	1	Baik
18	Timbangan Meja Kapasitas 10 Kg	4	Baik
19	Neraca Dengan Digital Display	1	Baik
20	Labu Takar (Volumetrik) berbagai kapasitas	44	Baik
21	Botol Uji Berbagai Ukuran	16	Baik
22	Alat Pemeliharaan Tanaman Lain-Lain	1	Baik

No	Jenis Sarana & Prasarana	Jumlah	Keterangan/Kondisi Barang
23	Rak-Rak Penyimpan	2	Baik
24	Lemari Penyimpan	18	Baik
25	Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian Lain-Lain	1	Baik
26	Alat Pengukur P.H. Tanah (Soil Tester)	2	Baik
27	Alat Penggiling Padi	1	Baik
28	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	3	Baik
29	Mesin Absen (Time Recorder)	3	Baik
30	Lemari Besi/Metal	1	Baik
31	Lemari Kayu	9	Baik
32	Filing Cabinet Besi	21	Baik
33	CCTV - Camera Control Television System	8	Baik
34	Alat Penghancur Kertas	2	Baik
35	Mesin Absensi	1	Baik
36	LCD Projector/Infocus	2	Baik
37	Focusing Screen/Layar LCD Projector	3	Baik
38	Papan Nama Instansi	18	Baik
39	Papan Pengumuman	7	Baik
40	Teralis	1	Baik
41	Meja Kerja Besi/Metal	15	Baik
42	Meja Kerja Kayu	89	Baik
43	Meja Rapat	3	Baik
44	Meja Panjang	2	Baik
45	Meja 1/2 Biro	16	Baik
46	Meja Makan Besi	1	Baik
47	Kursi Rapat	6	Baik
48	Kursi Tamu	1	Baik
49	Kursi Biasa	26	Baik
50	Partisi	5	Baik
51	Sofa	6	Baik
52	Filling Besi/Metal	4	Baik
53	Lemari Besi	2	Baik
54	Lemari Es	4	Baik
55	A.C. Window	9	Baik
56	A.C. Split	15	Baik
57	Kipas Angin	2	Baik
58	A.C. Unit	2	Baik
59	Treng Air/Tandon Air	1	Baik
60	Televisi	4	Baik
61	Amplifier	1	Baik

No	Jenis Sarana & Prasarana	Jumlah	Keterangan/Kondisi Barang
62	Loudspeaker	3	Baik
63	Microphone	13	Baik
64	Camera Video	6	Baik
65	Mesin Jahit	7	Baik
66	Handy Cam	2	Baik
67	Karpet	3	Baik
68	Gordyin/Kray	3	Baik
69	Handtruck Troly Plastics	6	Baik
70	Pakaian Panas/Lengkap	7	Baik
71	Alat Pembantu Kebakaran	18	Baik
72	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
73	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6	Baik
74	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	7	Baik
75	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	9	Baik
76	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
77	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	Baik
78	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	9	Baik
79	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	5	Baik
80	Kursi Kerja	30	Baik
81	Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain	5	Baik
82	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Baik
83	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	13	Baik
84	Buffet Kaca	1	Baik
85	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2	Baik
86	Audio Visual	11	Baik
87	Power Supply Microphone	1	Baik
88	Camera Electronic	15	Baik
89	Remote Control Unit	1	Baik
90	Layar Film/Projector	6	Baik
91	Camera Conference	1	Baik
92	Gimbal Stabilizer Kamera Studio	1	Baik
93	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	16	Baik
94	GPS Receiver	1	Baik
95	Jembatan Timbang	1	Baik
96	Telephone Mobile	3	Baik
97	Handy Talky (HT)	2	Baik
98	Facsimile	1	Baik
99	Emergency Kit	1	Baik
100	Conductivity Meter (Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	3	Baik

No	Jenis Sarana & Prasarana	Jumlah	Keterangan/Kondisi Barang
101	Camera Photo Micrograph	1	Baik
102	Filter	3	Baik
103	Anemometer Portable Digital	1	Baik
104	Oven (Alat Laboratorium Umum)	1	Baik
105	Vacum Pump	1	Baik
106	Alat Destilasi Air	2	Baik
107	PH Meter (Alat Laboratorium Umum)	1	Baik
108	Refractometer (Alat Laboratorium Umum)	1	Baik
109	Spectrophotometer	1	Baik
110	Filtration Apparatus	2	Baik
111	Alat Laboraturium Umum	1	Baik
112	Pipette Filter	46	Baik
113	Desicator	1	Baik
114	Reaktor Anaerobic	1	Baik
115	Alat Laboratorium Microbiologi A Lain-Lain	1	Baik
116	Automatic Pipet Set	2	Baik
117	Magnetic Stirles & Bars	6	Baik
118	Tips Pipet Sesuai Ukuran	2	Baik
119	Lemari Asam	1	Baik
120	Video Printer	5	Baik
121	Exhaust Fan	3	Baik
122	Filtration Unit	1	Baik
123	Hot Plate Stirer	1	Baik
124	Personal Computer	6	Baik
125	Sound Level Meter (Alat Laboratorium Pertanian)	1	Baik
126	Salinometer	1	Baik
127	AAS Attachment For HG Determination And 16 Lamp	1	Baik
128	Conduktimeter	3	Baik
129	Thermocouple	2	Baik
130	Water Sampler (General Laboratory Tool)	2	Baik
131	Beaker	1	Baik
132	Tabung Reaksi	10	Baik
133	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi IPA Dasar	4	Baik
134	Kompas	1	Baik
135	Gelas Piala	2	Baik
136	Gelas Penutup	10	Baik
137	Elektroda Tembaga (Voltameter)	6	Baik

No	Jenis Sarana & Prasarana	Jumlah	Keterangan/Kondisi Barang
138	Multi Channel Analyzer	1	Baik
139	Printer	1	Baik
140	Sumber Radiasi Lain-Lain	1	Baik
141	Pocket Altimeter	1	Baik
142	DO Meter (Alat Laboratorium Kualitas Air Dan Tanah)	8	Baik
143	Plankton Net (Alat Laboratorium Kualitas Air Dan Tanah)	2	Baik
144	Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah Lain-Lain	6	Baik
145	Container	2	Baik
146	Higt Volume Air Sampler	1	Baik
147	Gas Sampler	2	Baik
148	Dry Type Gas Meter	1	Baik
149	Alat Sampling Emisi Sumber Tidak Bergerak	4	Baik
150	Gas Chromatography High Resolution Time of Flight Mass Spectrometer	33	Baik
151	UV/VIS Spectrophotometer	1	Baik
152	Alat laboratorium penunjang Lain-Lain	4	Baik
153	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	1	Baik
154	Corong Kaca	7	Baik
155	Erlenmeyer	5	Baik
156	Botol Reagent	4	Baik
157	Hot Plate With Stirrer	1	Baik
158	P.C Unit	73	Baik
159	Lap Top	64	Baik
160	Note Book	31	Baik
161	Personal Komputer Lain-Lain	2	Baik
162	CPU (Peralatan Mainframe)	2	Baik
163	Plotter (Peralatan Mainframe)	1	Baik
164	Hard Disk	4	Baik
165	Peralatan Komputer Mainframe Lain-Lain	1	Baik
166	Monitor	1	Baik
167	Printer (Peralatan Personal Komputer)	103	Baik
168	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
169	Plotter (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
170	External/ Portable Hardisk	3	Baik
171	Hard disk Eksternal	23	Baik
172	Router	1	Baik
173	Modem	1	Baik
174	Wireless PCI Card	1	Baik

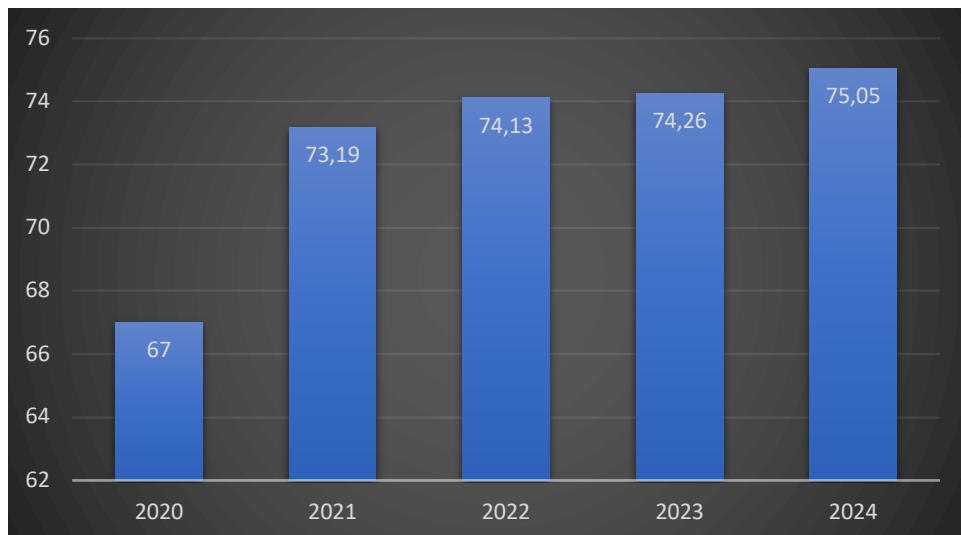
No	Jenis Sarana & Prasarana	Jumlah	Keterangan/Kondisi Barang
175	KABEL LAN PROLINK Cable Cat5e	1	Baik
176	USB-C To USB-A HUB With Ethernet	1	Baik
177	alat pelindung lainnya lainnya (dst)	6	Baik
178	Air Conditioning (AC)	12	Baik
179	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Komp. Balai Penyuluhan Pertanian, Jalan Teluk Paku, Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat, Tanjung Balai Karimun
180	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Kelurahan Muka Kuning, Kec Sei Beduk, Kota Batam
181	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	jalan Pamuka No 7B Sei Harapan Sekupang Batam
182	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	jln. pramuka no.7b sei harapan sekupang batam
183	Gedung Pos Jaga Permanen	1	Jl. Kawal Kecamatan gunung Kijang
184	Gedung Pos Jaga Permanen	1	Jl. Kijang KM. 20, Jl. Nusantara KM. 20 Kel. Sei Lekop-Bintan Timur
185	Gedung Pos Jaga Permanen	1	Hutan Lindung Gunung Sekunyam, Kabupaten Natuna
186	Gedung Pos Jaga Permanen	1	Kawasan Hutan Lindung Gunung Sekunyam, Kabupaten Natuna
187	Gedung Pos Jaga Permanen	1	Siantan Selatan, Kecamatan Siantan
188	Gedung Pos Jaga Permanen	1	Jemaja. Kecamatan Jemaja
189	Gedung Pos Jaga Permanen	1	Jemaja Timur, Kecamatan Jemaja Timur
190	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	Desa Pengujan
191	Lain-lain gedung tempat kerja lainnya	1	Komp. Balai Penyuluhan Pertanian, Jalan Teluk Paku, Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat, Tanjung Balai Karimun
192	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	1	KM. 20 Sri Bintan
193	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1	Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, 2025.

2.1.3 Kinerja Pelayanan DLHK Provinsi Kepulauan Riau

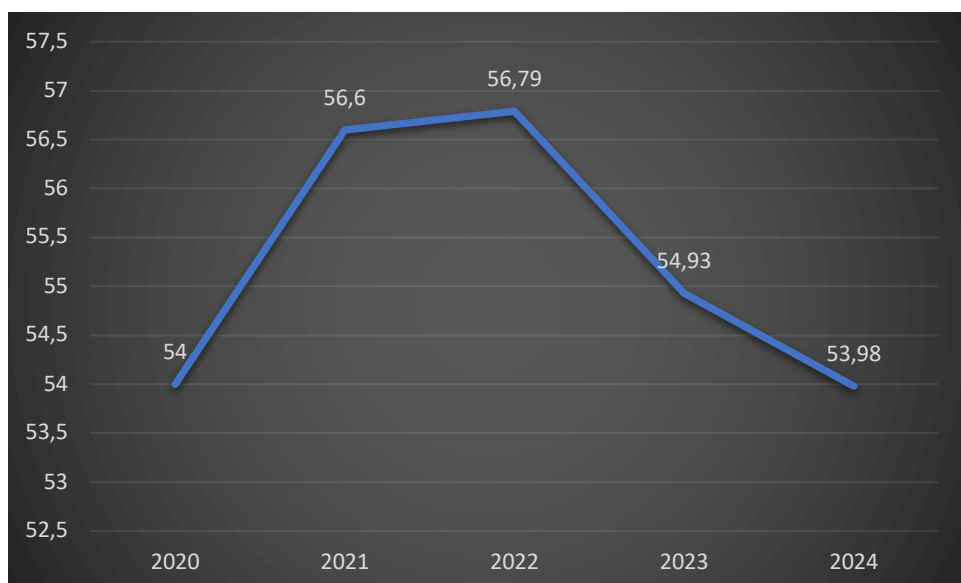
Lingkungan dengan kualitas baik sangat diperlukan bagi terciptanya kehidupan manusia yang aman, sehat, dan sejahtera. Menurunnya kualitas lingkungan dapat mengakibatkan berbagai manfaat yang disediakan alam bagi manusia menjadi berkurang bahkan bisa saja habis. Pelaksanaan urusan lingkungan hidup di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan terkait : 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi; 2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk KRP provinsi; 3) Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; 4) Pengelolaan Kehati provinsi; 5) Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; 6) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi; 7) Penetapan pengakuan dan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; 8) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi; 9) Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah provinsi; 10) Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: (a) usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi, (b) usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah kabupaten/kota; dan 11) Penanganan sampah di TPA/TPST regional.

Kinerja penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilaksanakan DLHK Provinsi Kepulauan Riau sudah cukup baik, sebagian besar indikator di tahun 2024 sudah dengan tingkat capaian lebih dari 90%, kecuali pada indikator Persentase pengurangan sampah (tingkat capaiannya 60,75%). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2020-2024 cenderung meningkat setiap tahunnya, dimana angka realisasi tertingginya ada di tahun 2024 sebesar 75,05. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah Provinsi pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut.



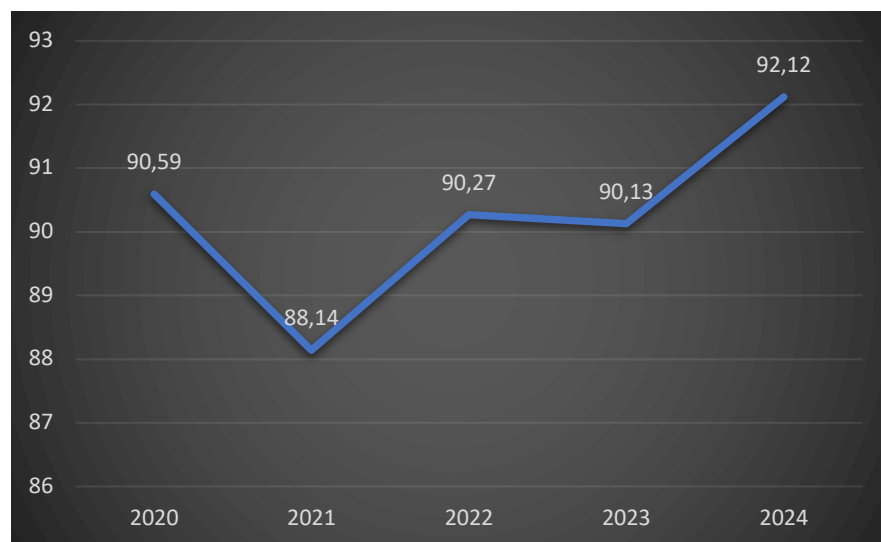
Gambar 2.2. IKLH Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

Indeks Kualitas Air (IKA) mencerminkan kondisi sumber daya air yang sangat penting bagi kehidupan manusia, ekosistem, dan keberlanjutan pembangunan. Kualitas air yang baik menunjukkan lingkungan yang sehat dan berfungsi secara optimal, sedangkan air yang tercemar dapat menjadi indikator adanya tekanan atau kerusakan lingkungan akibat aktivitas domestik, industri, dan pertanian. Oleh karena itu, pemantauan dan evaluasi kualitas air secara rutin menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan perlindungan lingkungan hidup. IKA Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2020-2024 tergolong fluktuatif, namun realisasi kinerjanya cenderung menurun. IKA tahun 2024 menurun dari tahun-tahun sebelumnya, menjadi sebesar 53,98.



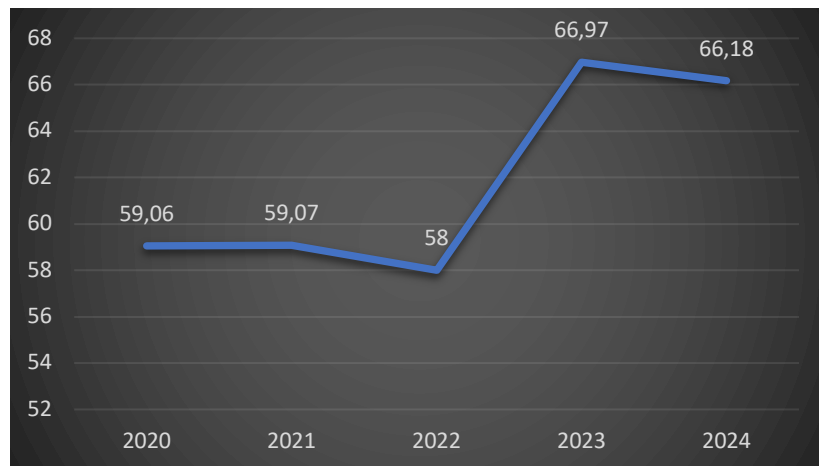
Gambar 2.3. Indeks Kualitas Air Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

Kualitas udara sangat berpengaruh terhadap kesehatan manusia, kelestarian ekosistem, dan kenyamanan hidup. Udara yang tercemar oleh polutan seperti SO_2 , NO_2 , CO , dan O_3 dapat memicu berbagai penyakit pernapasan, mempercepat perubahan iklim, serta merusak vegetasi dan lingkungan binaan. Oleh karena itu, pengukuran dan pemantauan kualitas udara secara konsisten menjadi langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Indeks Kualitas Udara Ambien (IKU) berfungsi sebagai indikator langsung terhadap efektivitas pengendalian emisi dari berbagai sumber, seperti transportasi, industri, dan pembakaran lahan. IKU Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2020-2024 tergolong fluktuatif dengan realisasi cenderung meningkat. IKU tahun 2024 menunjukkan angka tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 92,12.



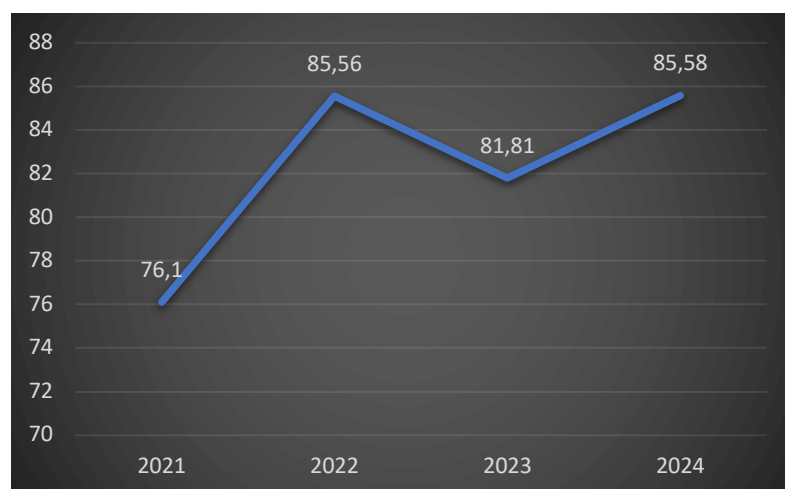
Gambar 2.4. Indeks Kualitas Udara Ambien Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

Indeks Kualitas Lahan (IKL) mencerminkan kondisi dan fungsi lahan dalam mendukung kehidupan, produktivitas, serta keseimbangan ekosistem. Kualitas lahan yang baik menunjang aktivitas pertanian, kehutanan, penyerapan air, dan penyimpanan karbon, sementara lahan yang terdegradasi akibat erosi, pencemaran, atau alih fungsi yang tidak terkendali dapat menyebabkan bencana lingkungan seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Oleh sebab itu, pengelolaan dan pemantauan kualitas lahan menjadi krusial dalam menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan. IKL Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2020-2024 tergolong fluktuatif dengan realisasi kinerja cenderung meningkat. IKL tahun 2024 sebesar 66,18.



Gambar 2.5. Indeks Kualitas Lahan (IKL) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

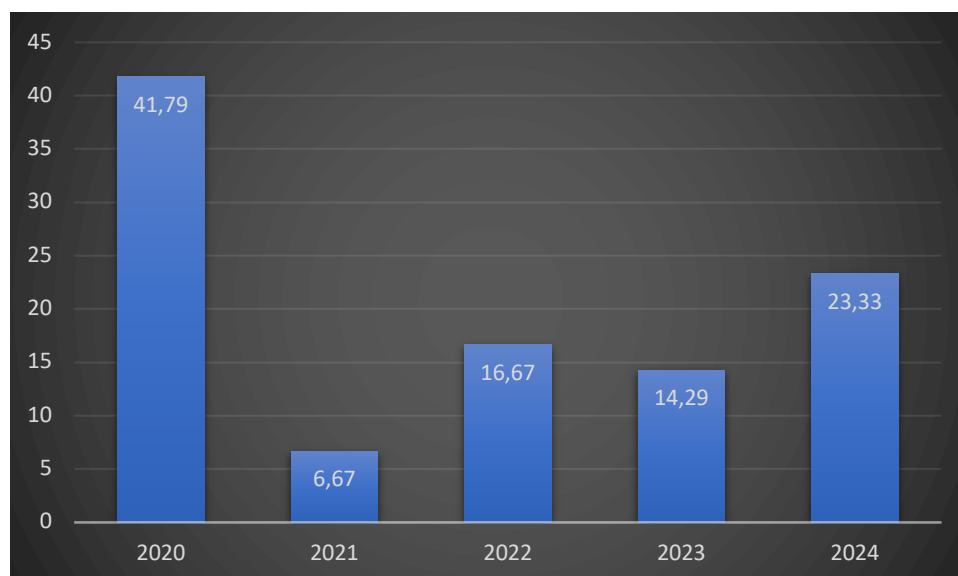
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) merupakan indikator penting dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), khususnya bagi wilayah pesisir dan laut yang memiliki peran strategis dalam mendukung kehidupan sosial, ekonomi, dan ekologis. Kualitas air laut yang baik menjadi penopang utama bagi keanekaragaman hayati laut, perikanan, pariwisata bahari, dan perlindungan kawasan pesisir. Sebaliknya, pencemaran laut akibat limbah domestik, industri, plastik, dan aktivitas maritim dapat merusak ekosistem terumbu karang, mengganggu rantai makanan, dan mengancam kesejahteraan masyarakat pesisir. IKAL digunakan untuk menilai sejauh mana pengelolaan lingkungan laut dan pesisir dilakukan secara berkelanjutan. IKAL Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2020-2024 tergolong fluktuatif dengan realisasi kinerja cenderung meningkat. IKAL tahun 2024 sebesar 85,58.



Gambar 2.6. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), serta peraturan perundang-undangan lingkungan hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi merupakan fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. Izin-izin tersebut bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan instrumen pengendalian untuk memastikan bahwa setiap kegiatan usaha tidak memberikan dampak negatif yang merugikan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Upaya mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen lingkungan, mengindikasikan bahwa pelaku usaha menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan yang ramah lingkungan, sekaligus turut menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah operasionalnya.

Ketaatan terhadap izin dan regulasi lingkungan merupakan tanggung jawab moral dan legal yang harus dijalankan secara konsisten demi terciptanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Realisasi capaian indikator Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH di Provinsi Kepulauan Riau tergolong fluktuatif, namun dari tahun 2020-2024 realisasi capaiannya masih di bawah 50%. Capaian ini tentu masih perlu untuk terus ditingkatkan. Ketaatan yang tinggi mencerminkan tanggung jawab sosial dan kepatuhan hukum pelaku usaha dalam mencegah, mengurangi, dan menangani dampak lingkungan yang mungkin timbul dari aktivitas mereka. Hal ini sekaligus memperkuat efektivitas pengawasan pemerintah daerah dalam menegakkan regulasi, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap keberlanjutan usaha.



Gambar 2.7. Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Secara lebih lengkap, berikut dijabarkan terkait Tabel Evaluasi Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Urusan yang Menjadi Tanggung Jawab DLHK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

Tabel 2.5

Evaluasi Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Urusan yang Menjadi Tanggung Jawab DLHK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

No	Indikator	Satuan	Target					Realisasi					Tingkat Capaian Renstra				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
A	IKK:																
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Indeks	69,2	69,8	69,73	69,95	70,18	67	73,19	74,13	74,26	75,05	96,82	104,86	106,31	106,16	106,94
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	%						41,79	6,67	16,67	14,29	23,33					
B	Urusan Lingkungan Hidup																
1	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	%	n/a	n/a	20	20	100	n/a	100	50	20	100			250,00	100,00	100,00
2	Indeks Kualitas Air Laut	indeks	n/a	n/a	76,76	76,76	78,04	n/a	76,1	85,56	81,81	85,58			111,46	106,58	109,66
3	Indeks Kualitas Air	indeks	n/a	n/a	56,7	56,7	56,9	54	56,6	56,79	54,93	53,98			100,16	96,88	94,87
4	Indeks Kualitas Udara Ambien	indeks	n/a	n/a	88,25	88,25	88,46	90,59	88,14	90,27	90,13	92,12			102,29	102,13	104,14
5	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	indeks	n/a	n/a	59,08	59,08	59,1	59,06	59,07	58	66,97	66,18			98,17	113,35	111,98
6	Persentase ketersediaan data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau	%	n/a	n/a	14,28	28,57	28,57	0	0	0	0	28,57			0,00	0,00	100,00

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Indikator	Satuan	Target					Realisasi					Tingkat Capaian Renstra				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
7	Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi	%	n/a	n/a	33,33	40	40	20	20	20	50	40			60,01	125,00	100,00
8	Tingkat kepatuhan terhadap regulasi	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100,00	100,00	100,00	100,00
9	Persentase Kab/Kota yang meraih Penghargaan	%	n/a	n/a	42,85	71,43	71,43	0	28,57	42,85	42,85	71,43			100,00	59,99	100,00
10	Persentase Perusahaan yang Taat Aturan	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100,00	100,00	100,00	100,00
11	Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	%	n/a	n/a	57,14	71,43	71,43	83,33	57,14	100	100	125,01			175,01	140,00	175,01
12	Persentase Pengurangan Sampah	%	n/a	n/a	26	26	28	22	24	14,82	14,43	17,01			57,00	55,50	60,75
13	Persentase Penanganan Sampah	%	n/a	n/a	73	73	71	75	74	72,42	67,65	71,01			99,21	92,67	100,01
C	Urusan Kehutanan																
1	Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan	Miliar Rp	n/a	n/a	27,1	27,1	27,3	26,9	28,34	28,34	27,12	26,29			104,58	100,07	96,30
2	Rehabilitasi Lahan Kritis	Ha	230	230	5	5	5	300	300	330	2	5	130,43	130,43	6600,00	40,00	100,00
3	Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat	Ha atau kelompok	n/a	n/a	500	500	30	88	500	500	110,73	30			100,00	22,15	100,00
4	Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau	DAS	n/a	n/a	2	2	2	2	2	2	3	2			100,00	150,00	100,00

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan DLHK Provinsi Kepulauan Riau

Urusan lingkungan hidup dan kehutanan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan pembagian kewenangannya ditentukan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kelompok sasaran layanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) meliputi masyarakat umum, masyarakat hukum adat (MHA), maupun pelaku usaha skala provinsi atau lintas kabupaten/kota.

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk terlibat secara aktif maupun pasif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Keterlibatan masyarakat dapat dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Lebih lanjut, peran masyarakat dalam proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berbentuk: pengawasan; pemberian pendapat, saran dan usul; keberatan; pengaduan; dan penyampaian informasi dan/atau pelaporan.

Masyarakat Hukum Adat (MHA) adalah kelompok masyarakat yang hidup secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu dengan struktur adat, hukum adat, dan institusi adat yang diakui secara kolektif. Sebagai contoh Masyarakat Adat Melayu Tua dan Orang Laut di Pulau Rempang. Komunitas ini memiliki hubungan erat dengan lingkungan pesisir dan laut, mempraktikkan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. DLHK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di daerah selaras dengan hak-hak masyarakat adat, terutama dalam hal pengakuan, pemanfaatan, dan pelestarian wilayah adat yang menjadi ruang hidup mereka. Selain itu, DLHK juga mendorong pelibatan masyarakat adat dalam program-program pelestarian lingkungan, seperti konservasi keanekaragaman hayati, pengelolaan hutan berbasis masyarakat, dan pengendalian kebakaran hutan/lahan secara lokal.

Terhadap pelaku usaha skala provinsi atau lintas kabupaten/kota, DLHK memiliki peran penting dalam mengatur, mengawasi, dan membina pelaku usaha yang beroperasi pada skala provinsi atau lintas kabupaten/kota agar kegiatan usahanya tetap sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. DLHK bertanggung jawab dalam proses penerbitan dan evaluasi dokumen lingkungan seperti

AMDAL, UKL-UPL, serta perizinan berusaha berbasis risiko yang menjadi syarat mutlak bagi pelaku usaha. DLHK bertugas memastikan bahwa dokumen lingkungan disusun secara partisipatif, sesuai kaidah ilmiah, dan mempertimbangkan daya dukung serta daya tampung lingkungan. Selain itu, DLHK juga berwenang melakukan penilaian terhadap kinerja pengelolaan lingkungan pelaku usaha melalui instrumen seperti PROPER daerah, audit lingkungan, dan pemantauan rutin terhadap pelaksanaan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL-RPL).

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi untuk bermitra baik dengan lembaga swasta, organisasi masyarakat sipil, hingga institusi pendidikan. Mitra-mitra ini memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan erat dengan pengelolaan lingkungan hidup, kehutanan, serta pengendalian dampak lingkungan. Berikut beberapa kemungkinan potensi mitra DLHK Provinsi Kepulauan Riau:

- 1) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan mitra dalam pengelolaan air bersih dan konservasi sumber air. DLHK dan PDAM bisa bekerja sama dalam upaya perlindungan hulu sungai dan pengelolaan kualitas air demi keberlanjutan layanan air minum.
- 2) Berbagai BUMN seperti PLN dan PTPN memiliki kegiatan industri yang berdampak terhadap lingkungan. DLHK memiliki peran pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL, pengelolaan limbah, serta mendorong pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan (CSR) oleh perusahaan-perusahaan tersebut.
- 3) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Walhi dan Greenpeace turut menjadi mitra penting dalam advokasi dan pemantauan kondisi lingkungan. Kehadiran LSM memperkuat fungsi kontrol sosial dan memperluas partisipasi publik dalam pelestarian lingkungan hidup.
- 4) Perguruan tinggi seperti universitas memiliki peran dalam menyediakan data ilmiah, riset teknologi ramah lingkungan, dan konsultasi kebijakan. DLHK Provinsi Kepulauan Riau bisa menjalin kemitraan akademik untuk mendukung program-program berbasis sains dan inovasi teknologi lingkungan.

- 5) Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) dan komunitas peduli lingkungan merupakan mitra yang aktif di tingkat akar rumput. Mereka melakukan kegiatan konservasi seperti penanaman pohon, pemantauan kualitas air, dan edukasi masyarakat. DLHK Provinsi Kepulauan Riau mendukung dan memfasilitasi kegiatan partisipatif tersebut.
- 6) Perusahaan swasta dari sektor industri, perkebunan, hingga pertambangan memiliki kewajiban untuk menjalankan AMDAL serta mengelola dampak lingkungan. DLHK Provinsi Kepulauan Riau bertindak sebagai pengawas dan pembina dalam memastikan bahwa sektor swasta menjalankan usahanya secara ramah lingkungan dan berkelanjutan.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Belum ada dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan Renstra ini disusun.

2.1.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Belum ada kerjasama daerah yang dibuktikan dengan MoU yang menjadi tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan Renstra ini disusun.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan DLHK Provinsi Kepulauan Riau

Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau mencatat ada beberapa permasalahan penting yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

1. Pencemaran laut akibat pembuangan limbah *sludge oil*, akibat kepadatan pelayaran kapal yang melintas di Selat Malaka dan Selat Singapura.
2. Kerusakan sumberdaya wilayah pesisir dan laut yang cenderung terjadi pada hampir di seluruh kabupaten/kota di Kepulauan Riau terutama kerusakan terumbu karang, lamun dan mangrove.

3. Kerentanan terhadap bencana alam. Dari 11 jenis risiko bencana yang mengancam Provinsi Kepulauan Riau, 7 di antaranya berada pada kelas/kategori risiko tinggi yaitu: (1) Wilayah Rawan Banjir, (2) Wilayah Rawan Banjir Bandang, (3) Wilayah Rawan Cuaca Ekstrim, (4) Wilayah Rawan Gelombang Ekstrim dan Abrasi, (5) Wilayah Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan, (6) Bahaya Kekeringan, (7) Bahaya Tanah Longsor.
4. Pemulihan lahan pasca tambang yang belum dilakukan reklamasi.
5. Belum optimalnya pengelolaan persampahan regional.
6. Meningkatnya luas kerusakan lahan dan hutan kritis.
7. Belum optimalnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).

2.2.2 Isu Strategis DLHK Provinsi Kepulauan Riau

Isu Strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Permasalahan atau isu strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau secara umum adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penanganan pencemaran lingkungan;
2. Kerusakan hutan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau;
3. Potensi bencana alam dan perubahan iklim; dan
4. Kurangnya kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Tabel 2.6

Perumusan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional (Sumatera)	
1	2	3	4	5	6	7
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Kawasan peruntukan hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 76/MenLHK-II/2015 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 207.569 Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 60.299 Hektar dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 536 Hektar di Provinsi Kepulauan Riau, dengan Rincian Kawasan Hutan Produksi terbagi menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) 79.259 hektar, Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 120.490 Hektar, Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas 74.367 Hektar.	Meningkatnya luas kerusakan lahan dan hutan kritis	Adanya alih fungsi lahan serta pengelolaan lingkungan dan SDA yang belum berkelanjutan yang menyebabkan rendahnya daya dukung lingkungan hidup	Demografi Global. Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang memengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. Menurut data World Population Prospects (2022), populasi dunia diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Sementara itu, kebutuhan terhadap pangan, energi, dan air akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Dampak dari hal tersebut adalah diperlukan penyesuaian sektor produksi untuk mendorong rentang kehidupan (life-span) yang semakin panjang.	Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi. Keseimbangan pengakuan nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan konservasi lingkungan perlu menjadi dimensi dasar dalam proses pembangunan. Peningkatan populasi Indonesia dihadapkan pada isu penurunan kualitas lingkungan, keanekaragaman hayati, dan ketersediaan sumber daya alam. Konversi lahan hutan untuk pertanian dan perkebunan telah mengurangi fungsi lingkungan hutan. Petani dan nelayan yang merupakan produsen pangan menghadapi masalah serius berupa stagnasi kesejahteraan.	Degradasi lingkungan karena aktivitas perkebunan kelapa sawit dan pertambangan.	Kerusakan Hutan yang Ada di Provinsi Kepulauan Riau. Kurangnya kualitas ruang terbuka hijau (RTH)

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional (Sumatera)	
1	2	3	4	5	6	7
				Isu pengelolaan sampah juga perlu diwaspadai, mengingat daya tampung tempat pemrosesan akhir (TPA) diprediksi akan penuh pada 2028. Saat ini, Indonesia berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan intensitasnya di lima sektor kunci, yakni energi, lahan, kelautan dan pesisir, industri, dan pengelolaan limbah. Pada sektor energi, pemenuhan ketahanan energi masih menghadapi tantangan dalam segi penyediaan, akses, maupun harga. Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dari aspek pendanaan, regulasi, inovasi, hingga kelembagaan diharapkan dapat menggantikan peran energi fosil. Dampak perubahan iklim berpotensi meningkatkan kerugian ekonomi,		

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional (Sumatera)	
1	2	3	4	5	6	7
				kerentanan masyarakat, dan intensitas bencana lingkungan, terutama di sektor air, laut dan pesisir, pertanian, serta kesehatan. Ancaman kelangkaan air muncul dari rendahnya efisiensi pengelolaan dan daya rusak sumber daya air. Akses terhadap air minum dan sanitasi yang buruk juga dapat menyebabkan timbulnya penyakit menular dan masalah pertumbuhan anak.		

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional (Sumatera)	
1	2	3	4	5	6	7
			Persaingan Sumber Daya Alam. Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (SDA) (energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang. Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan SDA di antaranya air, pangan, dan energi, mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Tingkat persaingan SDA global ke depan akan bergantung pada ketatnya faktor permintaan dan penawaran, di antaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi.			

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional (Sumatera)	
1	2	3	4	5	6	7
Pemanfaatan Ruang Laut Kondisi bentang wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan luas wilayah 425.214,676 Km2 didominasi oleh perairan laut, terdiri dari 2.408 pulau, baik berpenghuni dan belum berpenghuni, bernama maupun belum bernama. Wilayah perairan laut Provinsi Kepulauan Riau menyimpan berbagai potensi dan permasalahan sumberdaya antara lain di Selat Malaka-Singapura-Phillip yang berada di ALKI I-A karena merupakan salah satu simpul jalur pelayaran internasional yang sangat ramai. Selat Malaka-Singapura-Phillip, ALKI I-A dan perairan di sekitarnya merupakan area yang memiliki comparative advantage yang tinggi karena posisi geografisnya. Selain itu perairan laut Provinsi Kepulauan Riau memiliki sumberdaya yang melimpah meliputi perikanan laut, pertambangan dan sumberdaya mineral. Berbagai aspek yang terdapat pada perairan ini harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi konflik pemanfaatan ruang di laut, seperti	Pencemaran laut akibat pembuangan limbah sludge oil, akibat kepadatan pelayaran kapal yang melintas di Selat Malaka dan Selat Singapura	Tingginya tingkat pencemaran lingkungan yang berdampak pada menurunnya kelestarian ekosistem dan kualitas lingkungan hidup				Belum Optimalnya Penanganan Pencemaran Lingkungan

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional (Sumatera)	
1	2	3	4	5	6	7
terganggunya ekosistem yang sangat dilindungi oleh kegiatan pertambangan pasir timah maupun oleh limbah dari alur pelayaran.						
	Kerusakan sumberdaya wilayah pesisir dan laut yang cenderung terjadi pada hampir di seluruh kabupaten/kota di Kepulauan Riau terutama kerusakan terumbu karang, lamun dan mangrove.					
	Kerentanan terhadap bencana alam. Kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau tidak hanya menghadirkan tantangan dalam hal konektivitas antar wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, namun juga memiliki potensi		Perubahan Iklim. Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (tiga krisis global - The Triple Planetary Crisis) secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirakan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan,		Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana terutama di pesisir barat Sumatera.	Potensi Bencana Alam dan Perubahan Iklim

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional (Sumatera)	
1	2	3	4	5	6	7
	kerentanan terhadap bencana alam. Dari 11 jenis risiko bencana yang mengancam Provinsi Kepulauan Riau, 7 di antaranya berada pada kelas/kategori risiko tinggi yaitu; (1) Wilayah Rawan Banjir, (2) Wilayah Rawan Banjir Bandang, (3) Wilayah Rawan Cuaca Ekstrem, (4) Wilayah Rawan Gelombang Ekstrem dan Abrasi, (5) Wilayah Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan, (6) Bahaya Kekeringan, (7) Bahaya Tanah Longsor,		seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. Triple planetary crisis akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama secara business-as-usual (BaU) menuju ke praktik yang lebih berkelanjutan. Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian serta limbah dan penerapan ekonomi sirkular.			

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional (Sumatera)	
1	2	3	4	5	6	7
Kawasan Peruntukan Pertambangan Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan, baik wilayah yang sedang/sudah/belum dikerjakan kegiatan pertambangan dan sudah ditetapkan dalam Perencanaan Wilayah Pertambangan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Rencana kawasan peruntukan pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau seluas 12.343 Ha. Potensi pertambangan yang ada di provinsi Kepulauan Riau berupa batu granit di wilayah Karimun, Bintan, Lingga dan Kepulauan Anambas; Pasir di wilayah Karimun, Bintan, Batam dan Lingga; Timah di wilayah Karimun dan Lingga; Bauksit di wilayah Karimun, Bintan, dan Lingga, Biji Besi di wilayah Karimun, Lingga dan Kepulauan Anambas, Minyak dan Gas di wilayah Natuna dan Kepulauan Anambas, serta potensi galian tambang lainnya.	Pemulihan lahan pasca tambang yang belum dilakukan reklamasi.					Kerusakan Hutan yang Ada di Provinsi Kepulauan Riau

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional (Sumatera)	
1	2	3	4	5	6	7
	Belum optimalnya pengelolaan persampahan regional					Belum optimalnya penanganan pencemaran lingkungan
	Belum optimalnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)					

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

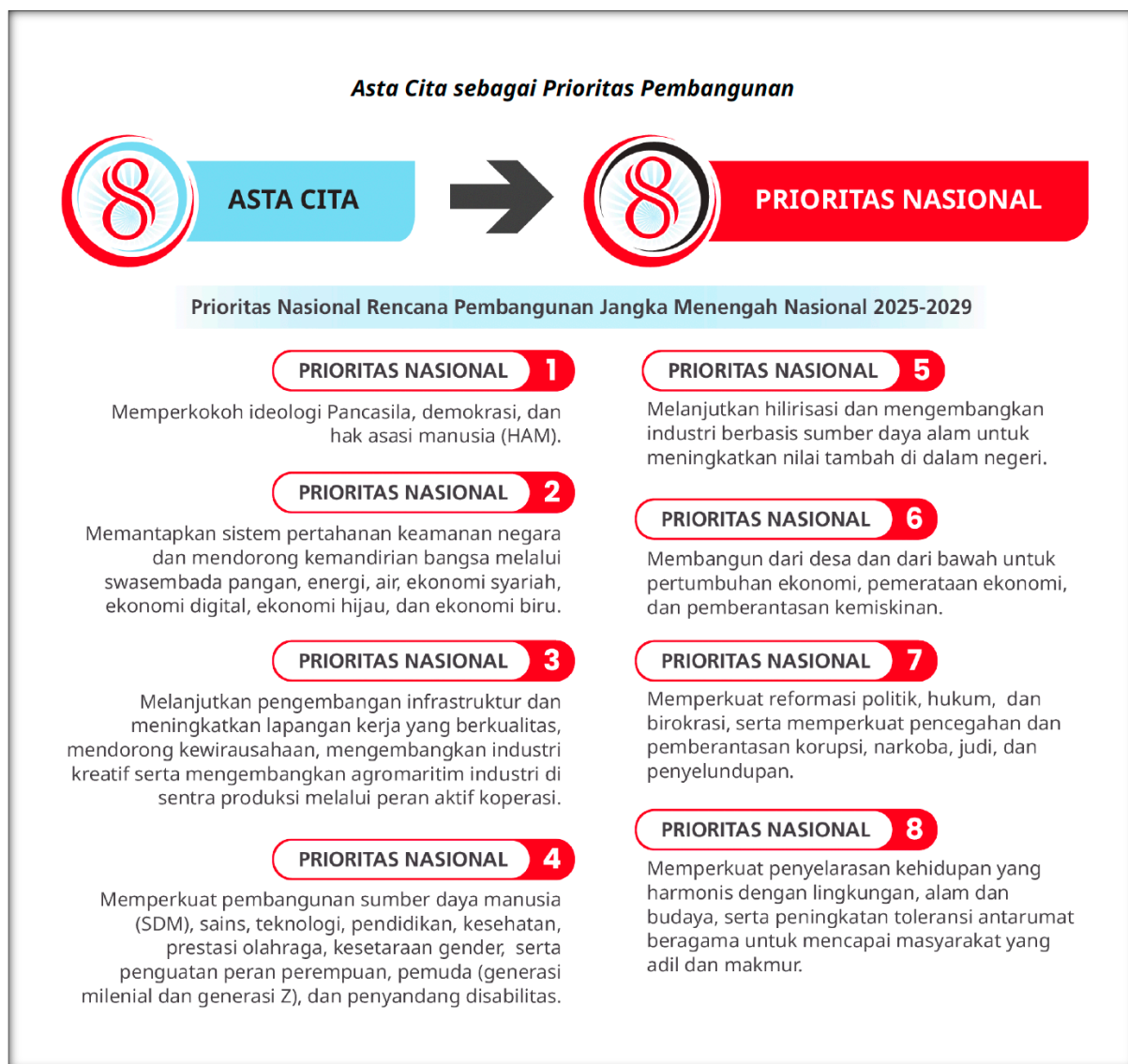
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra DLHK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan Riau merupakan tahapan penting yang harus dilakukan sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang dijalankan oleh DLHK selaras dan mendukung pencapaian Visi serta pelaksanaan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025–2029 dan memperhatikan arahan RPJMN Tahun 2025-2029.

RPJMN Tahun 2025–2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan Misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025–2029. Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025–2029. Untuk pencapaian sasarannya, setiap Prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkannya di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta).

Salah satu Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029 yaitu Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Kalimat tersebut merupakan bunyi dari Prioritas Nasional ke dua, dan yang berhubungan dengan DLHK adalah terkait dengan “Ekonomi Hijau”.

Bunyi spesifik kalimat sasaran dari Prioritas Nasional ke dua, utamanya yang terkait dengan Ekonomi Hijau adalah Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau dengan 10 sasaran yaitu: Indeks ekonomi hijau; Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah; Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) kumulatif; Persentase penurunan emisi RK tahunan; Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati; Indeks kualitas lingkungan hidup; Indeks kualitas udara; Indeks kualitas air; Indeks kualitas lahan; dan Indeks kualitas air laut.



Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Gambar 3.1. Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan

Perencanaan pembangunan di tingkat daerah provinsi diwujudkan dalam RPJMD. Sesuai dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029, Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 yaitu **“Kepulauan Riau Maju, Makmur dan Merata”** dengan Misi sebagai berikut:

- Misi 1: Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah;
- Misi 2: Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah;
- Misi 3: Mewujudkan Pemerataan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkarakter;

Misi 4: Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan;

Misi 5: Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Misi yang terkait dengan tugas DLHK yaitu misi kelima (ke-5) **“Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan”**. Misi ke-5 ini memiliki tujuan mewujudkan pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah, dengan indikator Penurunan Intensitas Emisi GRK. Sasaran yang dirumuskan yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan, dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, dan Indeks Ekonomi Hijau Daerah.

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, DLHK Provinsi Kepulauan Riau menetapkan tujuan dan sasaran disertai indikator yang terukur untuk dicapai dalam jangka waktu lima tahun, sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Tujuan yang dirumuskan oleh DLHK Provinsi Kepulauan Riau yaitu: **“Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”**, dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Sasaran Renstra DLHK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra DLHK. Sasaran yang dirumuskan oleh DLHK Provinsi Kepulauan Riau ada 2 yaitu: **“Meningkatnya Kualitas Udara, Air dan Air Laut”** dan **“Meningkatnya Kondisi Tutupan Hutan dan Non Hutan”**, dengan indikator:

1. Indeks kualitas udara;
2. Indeks kualitas air;
3. Indeks kualitas air laut;
4. Indeks kualitas tutupan lahan;
5. Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra DLHK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	75,46	75,67	75,88	76,09	76,30	76,52	
NSPK: Perencanaan Lingkungan Hidup; Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; Keanekaragaman Hayati (Kehati); Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3); Pembinaan dan		Meningkatnya Kualitas Udara, Air dan Air Laut	Indeks Kualitas Udara	Indeks	92,65	92,95	93,25	93,55	93,85	94,15	
			Indeks Kualias Air	Indeks	54,45	54,65	54,85	55,05	55,25	55,45	
			Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	85,75	85,81	85,87	85,93	85,99	86,05	
		Meningkatnya Kondisi Tutupan Hutan dan Non Hutan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	66,18	66,25	66,32	66,39	66,46	66,53	
			Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	%	0,43	0,47	0,52	0,57	0,63	0,69	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH); Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH; Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; Pengaduan Lingkungan Hidup; Persampahan											

3.2. Strategi DLHK dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra DLHK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

Strategi Renstra DLHK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra DLHK Provinsi Kepulauan Riau. Rumusan Strategi yang disusun yaitu:

1. Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui pengendalian alih fungsi lahan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan
2. Penguatan kebijakan dan penegakan hukum lingkungan.
3. Pencegahan dan pengendalian lingkungan hidup terhadap pencemaran

Tabel 3.2
Strategi Renstra DLHK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Menurunnya Meningkatnya Kualitas Udara, Air dan Air Laut	Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui pengendalian alih fungsi lahan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan	Peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian Pembangunan
	Meningkatnya Kondisi Tutupan Hutan dan Non Hutan			Manajemen Daerah Aliran Sungai
				Perlindungan kawasan keanekaragaman hayati
				Penguatan regulasi dan penegakan hukum dalam melindungi kawasan hutan beserta ekosistemnya
				Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
				Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola hutan secara berkelanjutan dengan kerja sama multihelix

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
1	2	3	4	5
		Penguatan kebijakan dan penegakan hukum lingkungan		Pelaksanaan monitoring dan pengawasan izin pelaku usaha/kegiatan pengelolaan limbah B3.
				Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
		Pencegahan dan pengendalian lingkungan hidup terhadap pencemaran		Kerjasama multistakeholder dan multi sektoral serta efisiensi kelembagaan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup
				Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan
				Perlindungan Kawasan Konservasi dan RTH
				Penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian Pembangunan
				Pengendalian pencemaran lingkungan
				Pengelolaan limbah dan sampah yang terpadu dan berbasis teknologi dengan digitalisasi manajemen persampahan
				Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk menerapkan 4R

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
1	2	3	4	5
				Penerapan ekonomi sirkular dengan penyediaan fasilitas Waste to Energy (WTE) dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)

Penahapan pembangunan merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra DLHK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3

Penahapan Renstra DLHK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Akselerasi untuk menjaga kelestarian dan kebersihan pantai dan laut; Manajemen Daerah Aliran Sungai;	Penguatan regulasi dan penegakan hukum dalam melindungi kawasan hutan beserta ekosistemnya	Pengelolaan risiko bencana multi ancaman, terutama banjir, gelombang tinggi, dan longsor	Pembangunan Infrastruktur pendukung industri pengolah limbah	Penerapan ekonomi sirkular dengan penyediaan fasilitas Waste to Energy (WTE) dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)

3.3. Arah Kebijakan DLHK dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra DLHK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Renstra DLHK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD, serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra DLHK Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 3.4

Arah Kebijakan Renstra DLHK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
1	2	3	4
	Sesuai UU 23 Tahun 2014: 1. RPPLH provinsi. 2. KLHS untuk KRP provinsi. 3. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah	Peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian Pembangunan
			Manajemen Daerah Aliran Sungai
			Perlindungan kawasan keanekaragaman hayati
			Penguatan regulasi dan penegakan hukum dalam melindungi kawasan hutan beserta ekosistemnya

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
1	2	3	4
	provinsi.		Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
	4. Pengelolaan Kehati provinsi.		
	5. Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.		Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola hutan secara berkelanjutan dengan kerja sama multihelix
	6. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.		Pelaksanaan monitoring dan pengawasan izin pelaku usaha/kegiatan pengelolaan limbah B3.
	7. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
			Kerja sama multistakeholder dan multi sektoral serta efisiensi kelembagaan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan
			Perlindungan Kawasan Konservasi dan RTH
	8. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.		Penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian Pembangunan
			Pengendalian pencemaran lingkungan
			Pengelolaan limbah dan sampah yang terpadu dan berbasis teknologi dengan digitalisasi manajemen persampahan
			Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk menerapkan 4R
	9. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi.		Penerapan ekonomi sirkular dengan penyediaan fasilitas <i>Waste to Energy</i> (WTE) dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)
			Pengembangan Perhutanan Sosial
	10. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah provinsi.		Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan DAS
	11. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan		

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
1	2	3	4
	yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah kabupaten/kota. 12. Penanganan sampah di TPA/TPST regional.		

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

4.1.1 Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra DLHK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 secara rinci ada pada Tabel 4.1. Program yang ditetapkan berjumlah total 14 program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup.
3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI).
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3).
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
10. Program Pengelolaan Persampahan.
11. Program Pengelolaan Hutan.
12. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.
13. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan.
14. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Pada DLHK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
2.11.3.28.0.00.10.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan							
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)		
		Meningkatnya Kualitas Udara, Air dan Air Laut			Indeks kualitas Udara (Indeks)		
					Indeks kualitas Air (Indeks)		
					Indeks Kualitas Air Laut (Indeks)		
			Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya tiga dokumen perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.11.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.11.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.11.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.11.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.11.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	2.11.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	2.11.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.11.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Tersedianya satu Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.11.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.11.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.11.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.11.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.11.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.11.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.11.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.11.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.11.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.11.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2.11.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.11.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.11.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.11.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.11.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.11.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2.11.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.11.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.11.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.11.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	2.11.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.11.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.11.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.11.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	2.11.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.11.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya laporan jasa penunjang perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.11.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.11.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.11.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.11.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya barang milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.11.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.11.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.11.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.11.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.11.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi (Unit)	2.11.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Memitigasi Dampak KRP		Persentase ketersediaan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (%)	2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya satu dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi (Dokumen)	2.11.02.1.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	
					jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi (Dokumen)	2.11.02.1.01.0004 - Penyusunan RPPLH Provinsi	
				Tersedianya dokumen laporan kajian lingkungan hidup strategi	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.1.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	
					Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.1.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	
					Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota (Dokumen)	2.11.02.1.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	
					Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.1.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.1.02.0007 - Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	
					Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota (Dokumen)	2.11.02.1.02.0009 - Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/Kota	
			Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Penurunan intensitas emisi GRK ((%))	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Tersedianya dokumen atau laporan pencegahan dan pencemaran kerusakan lingkungan hidup	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
					Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	
					Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	
					Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun (laporan)	2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	
					Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim (Laporan)	2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	
					Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	
					Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan (Unit)	2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2.11.03.1.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
					Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	2.11.03.1.01.0004 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	
					Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim (Laporan)	2.11.03.1.01.0005 - Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	
					Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun (laporan)	2.11.03.1.01.0008 - Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	
					Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	2.11.03.1.01.0009 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
					Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	2.11.03.1.01.0011 - Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	2.11.03.1.01.0012 - Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	
					Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan (Unit)	2.11.03.1.01.0013 - Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	
				Tersedianya laporan penanggulangan dan atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan (Laporan)	2.11.03.1.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
					Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan (Laporan)	2.11.03.1.02.0004 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya laporan pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan (Laporan)	2.11.03.1.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
					Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan (Laporan)	2.11.03.1.03.0014 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah ((%))	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
				Tersedianya dokumen atau laporan pengelolaan keanekaragaman hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	2.11.04.1.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	
					Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	2.11.04.1.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	
					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi (Ha)	2.11.04.1.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi (Unit)	2.11.04.1.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	2.11.04.1.01.0001 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi (Ha)	2.11.04.1.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
					Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	2.11.04.1.01.0006 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
					Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi (Unit)	2.11.04.1.01.0009 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	
			Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)		Persentase pengawasan terhadap izin pengelolaan limbah B3 (%)	2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersdianya dokumen atau laporan pengumpulan limbah B3 lintas daerah Kab/Kota dalam satu Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya (Dokumen)	2.11.05.1.01 - Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya (Dokumen)	2.11.05.1.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	
			Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan		Persentase kepatuhan terhadap rekomendasi lingkungan kepada unit usaha (%)	2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
				Terlaksananya pengawasan rekomendasi lingkungan dan PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Usaha/Kegiatan)	2.11.06.1.01 - Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	2.11.06.1.01 - Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	
					Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan (Dokumen)	2.11.06.1.01 - Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	
					Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan (Dokumen)	2.11.06.1.01.0001 - Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	
					Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	2.11.06.1.01.0005 - Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	
					Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Usaha/Kegiatan)	2.11.06.1.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup		Persentase Lembaga/Kelompok Masyarakat yang Meningkatkan Kapasitasnya Bidang Lingkungan Hidup (%)	2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
				Terselenggaranya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada lembaga atau kelompok masyarakat di bidang lingkungan hidup	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	2.11.08.1.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan (Dokumen)	2.11.08.1.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	2.11.08.1.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan (Dokumen)	2.11.08.1.01.0007 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup		Persentase Lembaga Masyarakat atau Dunia Usaha Yang dinilai kinerjanya dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)	2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
				Terselenggaranya penilaian kinerja PPLH untuk masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	2.11.09.1.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	2.11.09.1.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup		Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (%)	2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya penyelesaian pengaduan dan tindak pidana serta sengketa lingkungan hidup	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ditangani (Pengaduan)	2.11.10.1.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	
					Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi (Perkara)	2.11.10.1.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	
					Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi (Perkara)	2.11.10.1.01.0005 - Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	
					Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ditangani (Pengaduan)	2.11.10.1.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	
			Meningkatnya tata Kelola Persampahan		Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Persentase Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) (%)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
				Terlaksananya penanganan sampah	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota (Dokumen)	2.11.11.1.01 - Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	
					Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	2.11.11.1.01 - Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia (Unit)	2.11.11.1.01 - Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia (Unit)	2.11.11.1.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	
					Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	2.11.11.1.01.0009 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota (Dokumen)	2.11.11.1.01.0014 - Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	
		Meningkatnya Kondisi Tutupan Hutan dan Non Hutan			Indeks kualitas Tutupan Lahan (Indeks)		
					Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi (%)		
			Menurunnya Kerusakan hutan		Persentase tutupan lahan berhutan di Wilayah Prov. Kepri yang dipertahankan (%)	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	
				Persentase ketersediaan dokumen pengolahan rencana tata hutan KPH	Dokumen RKTP yang disahkan (Dokumen)	3.28.03.1.01 - Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi (Dokumen)	3.28.03.1.01 - Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi (Dokumen)	3.28.03.1.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	
					Dokumen RKTP yang disahkan (Dokumen)	3.28.03.1.01.0005 - Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP)	
				Tersedianya dokumen atau laporan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung (Dokumen)	3.28.03.1.03 - Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi (Dokumen)	3.28.03.1.03 - Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi (Dokumen)	3.28.03.1.03.0013 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung (Dokumen)	3.28.03.1.03.0015 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	
				Terlaksananya rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) (Dokumen)	3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	
					Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan (Laporan)	3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	
					Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara (Ha)	3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	
					Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (Ha)	3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	
					Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara (Ha)	3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	
					Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) (Dokumen)	3.28.03.1.04.0001 - Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara (Ha)	3.28.03.1.04.0004 - Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	
					Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan (Laporan)	3.28.03.1.04.0008 - Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	
					Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (Ha)	3.28.03.1.04.0009 - Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	
					Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara (Ha)	3.28.03.1.04.0011 - Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2	
				Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan produksi	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun (Laporan)	3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	
					Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (Dokumen)	3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	
					Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan (Ha)	3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (Dokumen)	3.28.03.1.05.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	
					Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun (Laporan)	3.28.03.1.05.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	
					Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan (Ha)	3.28.03.1.05.0007 - Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	
				Terlaksananya pengawasan unit manajemen Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi Kurang dari 6000 m3/Tahun	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi (Laporan)	3.28.03.1.07 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	
					Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi (Laporan)	3.28.03.1.07.0004 - Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem		Persentase kawasan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang dikelola dengan baik (%)	3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	
				Terlaksananya pengelolaan kawasan sumber daya alam hayati dan ekosistem	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan (Orang)	3.28.04.1.03 - Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	
					Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola (Ha)	3.28.04.1.03 - Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	
					Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani (Ha)	3.28.04.1.03 - Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	
					Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani (Ha)	3.28.04.1.03.0004 - Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan (Orang)	3.28.04.1.03.0005 - Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	
					Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola (Ha)	3.28.04.1.03.0006 - Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	
			Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia di bidang Kehutanan		Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat Hutan (SBM/Milyar Rupiah)	3.28.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	
				Terselenggaranya penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan (Kelompok)	3.28.05.1.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	
					Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya (Unit)	3.28.05.1.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya (Orang)	3.28.05.1.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	
					Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial (Hektar)	3.28.05.1.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	
					Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan (Kelompok)	3.28.05.1.01.0002 - Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	
					Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya (Orang)	3.28.05.1.01.0007 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	
					Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial (Hektar)	3.28.05.1.01.0008 - Penyiapan Perhutanan Sosial	
					Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya (Unit)	3.28.05.1.01.0009 - Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
			Meningkatnya Kelestarian dan Fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)		Persentase Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Kepulauan Riau Yang Terkelola dengan baik (%)	3.28.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan (Dokumen)	3.28.06.1.01 - Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS (Dokumen)	3.28.06.1.01 - Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS (Lembaga)	3.28.06.1.01 - Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS (Orang)	3.28.06.1.01 - Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS (Orang)	3.28.06.1.01.0004 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS (Lembaga)	3.28.06.1.01.0005 - Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	
					Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan (Dokumen)	3.28.06.1.01.0007 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	
					Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS (Dokumen)	3.28.06.1.01.0008 - Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	
2.11.3.28.0.00.10.0001 - UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup							
- Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Udara, Air dan Air Laut	Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Terlaksananya pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.11.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.11.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.11.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.11.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2.11.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.11.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.11.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2.11.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.11.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.11.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	2.11.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.11.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	2.11.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.11.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya laporan jasa penunjang perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.11.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.11.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Terpeliharanya barang milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.11.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.11.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.11.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.11.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.11.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.11.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Menurunnya Pecemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Persentase Lokasi Air Baku yang di Analisa (%)	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Tersedianya dokumen atau laporan pencegahan dan pencemaran kerusakan lingkungan hidup	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
					Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
					Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	2.11.03.1.01.0004 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	
					Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	2.11.03.1.01.0009 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
					Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	2.11.03.1.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	
2.11.3.28.0.00.10.0002 - UPTD KPHP Unit I Karimun							
- Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kondisi Tutupan Hutan dan Non Hutan	Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	3.28.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	3.28.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.28.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.28.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.28.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya laporan jasa penunjang perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.28.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.28.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Terpeliharanya barang milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.28.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.28.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.28.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.28.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.28.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi (Unit)	3.28.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Menurunnya Kerusakan hutan		Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar (%)	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	
				Tersedianya dokumen pengelolaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun (Dokumen)	3.28.03.1.01 - Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara (Unit)	3.28.03.1.01 - Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun (Dokumen)	3.28.03.1.01.0001 - Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	
					Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara (Unit)	3.28.03.1.01.0006 - Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	
				Tersedianya Dokumen rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun (Dokumen)	3.28.03.1.02 - Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun (Dokumen)	3.28.03.1.02.0001 - Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
				Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan produksi	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (Dokumen)	3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Operasi)	3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	
					Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan (Ha)	3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	
					Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (Dokumen)	3.28.03.1.05.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	
					Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Operasi)	3.28.03.1.05.0006 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	
					Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan (Ha)	3.28.03.1.05.0007 - Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	
2.11.3.28.0.00.10.0003 - UPTD KPHP Unit II Batam							
- Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kondisi Tutupan Hutan dan Non Hutan	Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	3.28.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3.28.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.28.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.28.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.28.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya laporan jasa penunjang perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.28.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.28.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terpeliharanya barang milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.28.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.28.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.28.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.28.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.28.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.28.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Menurunnya Kerusakan hutan		Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar (%)	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya dokumen pengelolaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun (Dokumen)	3.28.03.1.01 - Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	
					Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara (Unit)	3.28.03.1.01 - Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun (Dokumen)	3.28.03.1.01.0001 - Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	
					Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara (Unit)	3.28.03.1.01.0006 - Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	
				Tersedianya Dokumen rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun (Dokumen)	3.28.03.1.02 - Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun (Dokumen)	3.28.03.1.02.0001 - Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan produksi	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (Dokumen)	3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	
					Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Operasi)	3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	
					Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan (Ha)	3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	
					Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (Dokumen)	3.28.03.1.05.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	
					Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Operasi)	3.28.03.1.05.0006 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	
					Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan (Ha)	3.28.03.1.05.0007 - Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	
2.11.3.28.0.00.10.0004 - UPTD KPHP Unit III Lingga							
- Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kondisi Tutupan Hutan dan Non Hutan	Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	3.28.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	3.28.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.28.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.28.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.28.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya laporan jasa penunjang perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.28.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.28.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Terpeliharanya barang milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.28.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.28.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.28.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.28.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.28.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.28.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Menurunnya Kerusakan hutan		Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar (%)	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	
				Tersedianya dokumen pengelolaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun (Dokumen)	3.28.03.1.01 - Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	
					Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara (Unit)	3.28.03.1.01 - Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun (Dokumen)	3.28.03.1.01.0001 - Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	
					Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara (Unit)	3.28.03.1.01.0006 - Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	
				Tersedianya Dokumen rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun (Dokumen)	3.28.03.1.02 - Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun (Dokumen)	3.28.03.1.02.0001 - Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan produksi	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (Dokumen)	3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	
					Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Operasi)	3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	
					Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan (Ha)	3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	
					Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (Dokumen)	3.28.03.1.05.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	
					Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Operasi)	3.28.03.1.05.0006 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	
					Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan (Ha)	3.28.03.1.05.0007 - Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	
2.11.3.28.0.00.10.0005 - UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang							
- Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kondisi Tutupan Hutan dan Non Hutan	Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	3.28.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	3.28.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.28.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.28.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.28.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya laporan jasa penunjang perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.28.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.28.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Terpeliharanya barang milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.28.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.28.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.28.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.28.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.28.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.28.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Menurunnya Kerusakan hutan		Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar (%)	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	
				Tersedianya dokumen pengelolaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun (Dokumen)	3.28.03.1.01 - Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	
					Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara (Unit)	3.28.03.1.01 - Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun (Dokumen)	3.28.03.1.01.0001 - Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	
					Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara (Unit)	3.28.03.1.01.0006 - Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	
				Tersedianya Dokumen rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun (Dokumen)	3.28.03.1.02 - Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun (Dokumen)	3.28.03.1.02.0001 - Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan produksi	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (Dokumen)	3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	
					Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Operasi)	3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	
					Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan (Ha)	3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	
					Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (Dokumen)	3.28.03.1.05.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	
					Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Operasi)	3.28.03.1.05.0006 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	
					Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan (Ha)	3.28.03.1.05.0007 - Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	
2.11.3.28.0.00.10.0006 - UPTD KPHP Unit V Natuna							
- Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kondisi Tutupan Hutan dan Non Hutan	Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	3.28.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	3.28.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.28.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.28.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.28.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya laporan jasa penunjang perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.28.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.28.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.28.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.28.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Terpeliharanya barang milik daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.28.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.28.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.28.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.28.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Menurunnya Kerusakan hutan		Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar (%)	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	
				Tersedianya dokumen pengelolaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun (Dokumen)	3.28.03.1.01 - Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	
					Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara (Unit)	3.28.03.1.01 - Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun (Dokumen)	3.28.03.1.01.0001 - Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	
					Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara (Unit)	3.28.03.1.01.0006 - Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	
				Tersedianya Dokumen rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun (Dokumen)	3.28.03.1.02 - Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun (Dokumen)	3.28.03.1.02.0001 - Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
				Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan produksi	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (Dokumen)	3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	
					Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Operasi)	3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	
					Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan (Ha)	3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	
					Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (Dokumen)	3.28.03.1.05.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	
					Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Operasi)	3.28.03.1.05.0006 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	
					Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan (Ha)	3.28.03.1.05.0007 - Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	
2.11.3.28.0.00.10.0007 - UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas							

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
- Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kondisi Tutupan Hutan dan Non Hutan	Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	3.28.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	3.28.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.28.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.28.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3.28.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.28.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya laporan jasa penunjang perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.28.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.28.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.28.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.28.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Terpeliharanya barang milik daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.28.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.28.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.28.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.28.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Menurunnya Kerusakan hutan		Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar (%)	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	
				Tersedianya dokumen pengelolaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun (Dokumen)	3.28.03.1.01 - Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	
					Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara (Unit)	3.28.03.1.01 - Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun (Dokumen)	3.28.03.1.01.0001 - Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	
					Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara (Unit)	3.28.03.1.01.0006 - Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Dokumen rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun (Dokumen)	3.28.03.1.02 - Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun (Dokumen)	3.28.03.1.02.0001 - Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
				Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan produksi	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (Dokumen)	3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	
					Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Operasi)	3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	
					Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan (Ha)	3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	
					Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (Dokumen)	3.28.03.1.05.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Operasi)	3.28.03.1.05.0006 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	
					Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan (Ha)	3.28.03.1.05.0007 - Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan Pendanaan DLHK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				31.439.488,883		37.319.497.484,66		36.156.414.207,33		36.656.414.207,33		36.656.414.207,33		39.069.114.207,33	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						35.277.497.484,66		35.009.114.207,33		35.009.114.207,33		35.009.114.207,33		35.279.114.207,33	
Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	0	83,98	235.471.700,00	84,45	211.438.978,00	84,65	275.000.000,00	84,87	275.000.000,00	85,07	275.000.000,00	85,30	275.000.000,00	2.11.3.28.0.00.10.0001 - UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
2.11.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	
2.11.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	
2.11.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	16.246.700		51.438.978,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00	
Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0			1	51.438.978,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0			1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1			1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0			1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0			1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1			1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0			1		1		1		1		1		

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.11.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0	1	1.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
2.11.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						2.500.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0	1	2.500.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
2.11.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0	0	1	1.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
2.11.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	11.296.700	1	15.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
2.11.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material						4.438.978,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0	0	0	1	4.438.978,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
2.11.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu						2.500.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	-	-	1	2.500.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
2.11.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	4.950.000	1	25.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	
2.11.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						25.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Tersedianya Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	25.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	0	0	0		1		1		1		1		
2.11.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel						0,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	0	0	0	0,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.11.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	25.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	
2.11.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00	
Tersedianya laporan jasa penunjang perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	69.225.000	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	
2.11.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	69.225.000	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	
2.11.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1	150.000.000		55.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00	
Terpeliharanya barang milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0			1	55.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0			10		10		10		10		10		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0			2		2		2		2		2		
2.11.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	-	-	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	
2.11.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	-	-	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	
2.11.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						25.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	150.000.000	1	25.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kelutanan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB			BB	35.066.058.506,66	BB	34.734.114.207,33	BB	34.734.114.207,33	BB	34.734.114.207,33	BB	35.004.114.207,33	2.11.3.28.0.00.10.0000 - Dimas Lingkungan Hidup dan Kelutanan
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	0			80,43		80,47		80,51		80,51		80,51		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	83,82	84,25		84,44		84,65		84,87		85,08		85,30		
2.11.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3	213.985.234		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		450.000.000,00	
Tersedianya tiga dokumen perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1			1	180.000.000,00	1	180.000.000,00	1	180.000.000,00	1	180.000.000,00	1	450.000.000,00	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2			2		2		2		2		2		
2.11.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		250.000.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	134.687.034	2	65.000.000,00	2	65.000.000,00	2	65.000.000,00	2	65.000.000,00	2	250.000.000,00	
2.11.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						115.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		200.000.000,00	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	79.298.200	1	115.000.000,00	1	115.000.000,00	1	115.000.000,00	1	115.000.000,00	1	200.000.000,00	
2.11.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	28.054.128.641		33.058.114.207,33		32.838.114.207,33		32.838.114.207,33		32.838.114.207,33		32.838.114.207,33	
Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	132			192	33.058.114.207,33	192	32.838.114.207,33	192	32.838.114.207,33	192	32.838.114.207,33	192	32.838.114.207,33	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1			1		1		1		1		1		
2.11.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						32.483.002.207,33		32.263.002.207,33		32.263.002.207,33		32.263.002.207,33		32.263.002.207,33	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	132	135	27.479.016.641	192	32.483.002.207,33	192	32.263.002.207,33	192	32.263.002.207,33	192	32.263.002.207,33	192	32.263.002.207,33	
2.11.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						575.112.000,00		575.112.000,00		575.112.000,00		575.112.000,00		575.112.000,00	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	575.112.000	1	575.112.000,00	1	575.112.000,00	1	575.112.000,00	1	575.112.000,00	1	575.112.000,00	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.11.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						25.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Tersedianya satu Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	0	1	25.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	
2.11.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						25.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	0	1	25.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	
2.11.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0	0		210.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00	
Terlaksananya pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4			6	210.000.000,00	6	130.000.000,00	6	130.000.000,00	6	130.000.000,00	6	130.000.000,00	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0			1		1		1		1		1		
2.11.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						150.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00	
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0	1	150.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	
2.11.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4	0	0	6	60.000.000,00	6	60.000.000,00	6	60.000.000,00	6	60.000.000,00	6	60.000.000,00	
2.11.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	343.503.041		540.561.022,00		586.000.000,00		586.000.000,00		586.000.000,00		586.000.000,00	
Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1			1	540.561.022,00	1	586.000.000,00	1	586.000.000,00	1	586.000.000,00	1	586.000.000,00	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1			1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0			1		1		1		1		1		

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1			1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1			1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1			1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1			1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1			1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1			1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1			1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1			1		1		1		1		1		
2.11.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.599.900,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	0	0	1	5.599.900,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
2.11.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						6.175.250,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	0	0	1	6.175.250,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
2.11.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.660.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	7.924.000	1	5.660.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
2.11.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor						108.056.344,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	62.119.200	1	108.056.344,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	
2.11.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						65.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	61.935.441	1	65.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	
2.11.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						20.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	6.573.600	1	20.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	
2.11.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material						4.438.978,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	0	0	1	4.438.978,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
2.11.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu						9.064.750,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	21.942.800	1	9.064.750,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
2.11.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						300.000.000,00		321.000.000,00		321.000.000,00		321.000.000,00		321.000.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	167.008.000	1	300.000.000,00	1	321.000.000,00	1	321.000.000,00	1	321.000.000,00	1	321.000.000,00	
2.11.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						16.565.800,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1	16.000.000	1	16.565.800,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	
2.11.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0	0		620.000.000,00		380.000.000,00		380.000.000,00		380.000.000,00		380.000.000,00	
Tersedianya Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0			1	620.000.000,00	1	380.000.000,00	1	380.000.000,00	1	380.000.000,00	1	380.000.000,00	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	30			5		5		5		5		5		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	18			1		1		1		1		1		
2.11.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						450.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	18	0	0	1	450.000.000,00	1	230.000.000,00	1	230.000.000,00	1	230.000.000,00	1	230.000.000,00	
2.11.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel						70.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	0	0	1	70.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.11.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	30	0	0	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	
2.11.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2	2.051.593.360		72.383.277,33		240.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00	
Tersedianya laporan jasa penunjang perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1			1	72.383.277,33	1	240.000.000,00	1	240.000.000,00	1	240.000.000,00	1	240.000.000,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1			1		1		1		1		1		
2.11.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	11.310.000	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	
2.11.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						52.383.277,33		220.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	2.040.283.360	1	52.383.277,33	1	220.000.000,00	1	220.000.000,00	1	220.000.000,00	1	220.000.000,00	
2.11.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			15	466.865.000		360.000.000,00		360.000.000,00		360.000.000,00		360.000.000,00		360.000.000,00	
Terselenggaranya barang milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1			1	360.000.000,00	1	360.000.000,00	1	360.000.000,00	1	360.000.000,00	1	360.000.000,00	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	7			7		7		7		7		7		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8			35		35		35		35		35		
2.11.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	7	6	263.712.000	7	250.000.000,00	7	250.000.000,00	7	250.000.000,00	7	250.000.000,00	7	250.000.000,00	
2.11.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	
Terselenggaranya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8	8	19.080.000	35	35.000.000,00	35	35.000.000,00	35	35.000.000,00	35	35.000.000,00	35	35.000.000,00	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.11.01.1.09.0009 - Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	184.073.000	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						85.000.000,00		140.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00		770.000.000,00	
Memangkutnya Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Memitigasi Dampak KRP	Persentase ketersediaan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (%)	100	100	216.747.159	100	85.000.000,00	100	140.000.000,00	100	240.000.000,00	100	240.000.000,00	100	770.000.000,00	2.11.3.28.0.00.10.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.02.1.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi						35.000.000,00		35.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		350.000.000,00	
Tersedianya satu dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi (Dokumen)	0	0	0	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	1	350.000.000,00	
2.11.02.1.01.0004 - Penyusunan RPPLH Provinsi						35.000.000,00		35.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		350.000.000,00	
RPPLH Provinsi yang disusun	jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi (Dokumen)	0	0	0	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	1	350.000.000,00	
2.11.02.1.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi			1	216.747.159		50.000.000,00		105.000.000,00		155.000.000,00		155.000.000,00		420.000.000,00	
Tersedianya dokumen laporan kajian lingkungan hidup strategi	Jumlah dokumen telaah kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota (Dokumen)	0			1	50.000.000,00	1	105.000.000,00	1	155.000.000,00	1	155.000.000,00	1	420.000.000,00	
	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun (Dokumen)	0			0		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun (Dokumen)	1			0		1		1		1		1		
2.11.02.1.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD						0,00		35.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		350.000.000,00	
Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun (Dokumen)	1	1	216.747.159	0	0,00	1	35.000.000,00	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	1	350.000.000,00	
2.11.02.1.02.0007 - Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang						0,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun (Dokumen)	0	0	0	0	0,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	
2.11.02.1.02.0009 - Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/Kota						50.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	
Tersedianya dokumen telaah kesesuaian kaedah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota	Jumlah dokumen telaah kesesuaian kaedah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota (Dokumen)	0	0	0	1	50.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						500.000.000,00		495.000.000,00		695.000.000,00		695.000.000,00		1.025.000.000,00	
Memurunya Pecemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	2,54	3,76		5,03	500.000.000,00	6,30	495.000.000,00	7,57	695.000.000,00	8,84	695.000.000,00	10,11	1.025.000.000,00	2.11.3.28.0.00.10.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			0	0		280.000.000,00		275.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00		705.000.000,00	
Tersedianya dokumen atau laporan pencegahan dan pencemaran kerusakan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	0			1	280.000.000,00	1	275.000.000,00	1	375.000.000,00	1	375.000.000,00	1	705.000.000,00	
	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan (Unit)	0			2		1		1		1		1		
	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	0			1		1		1		1		1		
	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim (Laporan)	0			0		1		1		1		1		
	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun (laporan)	0			1		1		1		1		1		
	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	0			1		1		1		1		1		
	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	0			1		1		1		1		1		

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN-OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	0			5		4		9		9		20		
2.11.03.1.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim						35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		75.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	0	0	0	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	75.000.000,00	
2.11.03.1.01.0004 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan						40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	
Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	0	0	0	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	
2.11.03.1.01.0005 - Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi						0,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	
Terlaksananya upaya mitigasi perubahan iklim di tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim di tingkat provinsi (Laporan)	0	0	0	0	0,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	
2.11.03.1.01.0008 - Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut						35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	
Laporan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun (laporan)	0	0	0	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	
2.11.03.1.01.0009 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						50.000.000,00		40.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		200.000.000,00	
Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	0	0	0	5	50.000.000,00	4	40.000.000,00	9	90.000.000,00	9	90.000.000,00	20	200.000.000,00	
2.11.03.1.01.0011 - Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK						35.000.000,00		35.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		200.000.000,00	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tersedianya dokumen hasil inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	0	0		1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	1	200.000.000,00	
2.11.03.1.01.0012 - Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah						35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	
Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	0	0	0	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	
2.11.03.1.01.0013 - Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi						50.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		85.000.000,00	
Tersedianya peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan (Unit)	0	0	0	2	50.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	85.000.000,00	
2.11.03.1.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup						0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Tersedianya laporan penanggulangan dan atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan (Laporan)	0	0	0	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
2.11.03.1.02.0004 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan						0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan (Laporan)	0	0	0	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
2.11.03.1.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup						0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Tersedianya laporan pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan (Laporan)	0	0	0	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
2.11.03.1.03.0014 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan						0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan (Laporan)	0	0	0	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Lokasi Air Baku yang di Analisa (%)	46,67	47	120.000.000	53,33	500.000.000,00	60,00	495.000.000,00	73,33	695.000.000,00	86,67	695.000.000,00	100	1.025.000.000,00	2.11.3.28.0.00.10.0001 - UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			1	120.000.000		220.000.000,00		170.000.000,00		270.000.000,00		270.000.000,00		270.000.000,00	
Tersedianya dokumen atau laporan pencegahan dan pencemaran kerusakan lingkungan hidup	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	1			1	220.000.000,00	1	170.000.000,00	1	270.000.000,00	1	270.000.000,00	1	270.000.000,00	
	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	0			8		5		10		10		10		
	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	0			1		1		1		1		1		
2.11.03.1.01.0004 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan						40.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	0	0	0	1	40.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	
2.11.03.1.01.0009 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						80.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	0	0	0	8	80.000.000,00	5	50.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	
2.11.03.1.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi						100.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	1	1	120.000.000	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN						50.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		305.000.000,00	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN-OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)															
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (%)	0	0,495	0	0,505	50.000.000,00	0,515	85.000.000,00	0,525	85.000.000,00	0,535	85.000.000,00	0,545	305.000.000,00	2.11.3.28.0.00.10.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.04.1.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi			0	0		50.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		305.000.000,00	
Tersedianya dokumen atau laporan pengelolaan keanekaragaman hayati	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi (Ha)	0			0	50.000.000,00	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	3	305.000.000,00	
	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	0			1		1		1		1		1		
	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	0			3		2		2		2		2		
	Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi (Unit)	0			0		1		1		1		1		
2.11.04.1.01.0001 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati						35.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	0	0	0	1	35.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
2.11.04.1.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						0,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		250.000.000,00	
Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi (Ha)	0	0	0	0	0,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	3	250.000.000,00	
2.11.04.1.01.0006 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati						15.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Meningkatnya jumlah orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	0	0	0	3	15.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	
2.11.04.1.01.0009 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya						0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Taman keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi (Unit)	0	0	0	0	0,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)						100.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		300.000.000,00	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)	Persentase pengawasan terhadap izin pengolahan limbah B3 (%)	50,00	50	72.117.000	53,57	100.000.000,00	57,14	50.000.000,00	67,86	100.000.000,00	78,57	100.000.000,00	100	300.000.000,00	2.11.3.28.0.00.10.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.05.1.01 - Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						100.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		300.000.000,00	
Tersedianya dokumen atau laporan pengumpulan limbah B3 linta daerah Kab/Kota dalam satu Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemurnifatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya (Dokumen)	1	1	72.117.000	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	300.000.000,00	
2.11.05.1.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemurnifatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan						100.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		300.000.000,00	
Tertakutannya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 Dalam Rangka Pengangkutan, Pemurnifatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemurnifatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya (Dokumen)	1	1	72.117.000	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	300.000.000,00	
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						120.000.000,00		85.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		245.000.000,00	
Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase kepatuhan terhadap rekomendasi lingkungan kepada unit usaha (%)	12,20	22	-	32,93	120.000.000,00	32,93	85.000.000,00	53,66	135.000.000,00	53,66	135.000.000,00	100,00	245.000.000,00	2.11.3.28.0.00.10.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.06.1.01 - Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			25	0		120.000.000,00		85.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		245.000.000,00	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Terlaksananya pengawasan rekomendasi lingkungan dan PPLI yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Usaha/Kegiatan)	20			27	120.000.000,00	27	85.000.000,00	44	135.000.000,00	44	135.000.000,00	98	245.000.000,00	
	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan (Dokumen)	0			1		1		1		1		1		
	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	0			3		2		2		2		2		
2.11.06.1.01.0001 - Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH						50.000.000,00		20.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	
Kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan (Dokumen)	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan (Dokumen)	0	0	0	1	50.000.000,00	1	20.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	
2.11.06.1.01.0005 - Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup						15.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	0	0	0	3	15.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	
2.11.06.1.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						55.000.000,00		55.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		200.000.000,00	
Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Usaha/Kegiatan)	20	0	0	27	55.000.000,00	27	55.000.000,00	44	90.000.000,00	44	90.000.000,00	98	200.000.000,00	
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATHIAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						70.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		210.000.000,00	
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Lembaga/Kelompok Masyarakat yang Meningkatkan Kapasitasnya Bidang Lingkungan Hidup (%)	6,19	6,19	-	6,64	70.000.000,00	6,64	45.000.000,00	7,08	45.000.000,00	7,52	45.000.000,00	7,52	210.000.000,00	2.11.3.28.0.00.10.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Ketahanan
2.11.08.1.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi			14	0		70.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		210.000.000,00	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Terselenggaranya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada lembaga atau kelompok masyarakat di bidang lingkungan hidup	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	0			3	70.000.000,00	2	45.000.000,00	2	45.000.000,00	2	45.000.000,00	2	210.000.000,00	
	Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan (Dokumen)	1			1		1		1		1		1		
2.11.08.1.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat						15.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala provinsi yang terdaftar di Provinsi yang ditunjukkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	0	0	0	3	15.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	
2.11.08.1.01.0007 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup						55.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		200.000.000,00	
Terkelaksananya pengembangan generasi lingkungan melalui pembinaan, pendampingan, pembentukan dan pemberdayaan kader lingkungan, penyuluhan, dan pemberian penghargaan	Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan (Dokumen)	1	0	0	1	55.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	200.000.000,00	
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						52.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		150.000.000,00	
Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup	Persentase Lembaga Masyarakat atau Dunia Usaha yang dinilai kinerjanya dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)	53,19	57	-	59,57	52.000.000,00	68,09	50.000.000,00	78,72	50.000.000,00	91,49	50.000.000,00	100	150.000.000,00	2.11.3.28.0.00.10.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.09.1.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi						52.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		150.000.000,00	
Terselenggaranya penilaian kinerja PPLH untuk masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dimilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	10	10	0	28	52.000.000,00	27	50.000.000,00	27	50.000.000,00	27	50.000.000,00	81	150.000.000,00	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.11.09.1.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						52.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		150.000.000,00	
Tertelaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	10	0	0	28	52.000.000,00	27	50.000.000,00	27	50.000.000,00	27	50.000.000,00	81	150.000.000,00	
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						115.000.000,00		87.300.000,00		137.300.000,00		137.300.000,00		153.000.000,00	
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidma Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (%)	9,76	9,76	10.428.400,00	12,20	115.000.000,00	14,63	87.300.000,00	17,07	137.300.000,00	21,95	137.300.000,00	24,39	153.000.000,00	2.11.3.28.0.00.10.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.10.1.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi			4	10.428.400		115.000.000,00		87.300.000,00		137.300.000,00		137.300.000,00		153.000.000,00	
Tertelaksananya penyelesaian pengaduan dan tindak pidana serta sengketa lingkungan hidup	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi (Perkara)	4			13	115.000.000,00	9	87.300.000,00	9	137.300.000,00	9	137.300.000,00	13	153.000.000,00	
	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ditangani (Pengaduan)	0			13		10		20		20		20		
2.11.10.1.01.0005 - Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi						50.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		50.000.000,00	
Diselesaikannya sengketa lingkungan hidup yang ditangani baik Melalui Pengadilan ataupun di Luar Pengadilan yang merupakan kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi (Perkara)	4	0	0	13	50.000.000,00	9	35.000.000,00	9	35.000.000,00	9	35.000.000,00	13	50.000.000,00	
2.11.10.1.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi						65.000.000,00		52.300.000,00		102.300.000,00		102.300.000,00		103.000.000,00	
Peningkatan Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ditangani (Pengaduan)	0	4	10.428.400	13	65.000.000,00	10	52.300.000,00	20	102.300.000,00	20	102.300.000,00	20	103.000.000,00	
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAAHAN						950.000.000,00		110.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		632.000.000,00	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatnya tata Kelola Persampahan	Persentase Timbulan Sampah Tersedia di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) (%)	11,68	12	10.121.048	15,90	950.000.000,00	19,80	110.000.000,00	23,70	160.000.000,00	27,60	160.000.000,00	31,50	632.000.000,00	2.11.3.28.0.00.10.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Pemih Pengumpulan Sampah (% RT) (%)	84,76	85		85,75		86,50		87,25		88,00		88,75		
2.11.11.1.01 - Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional			15	10.121.048		950.000.000,00		110.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		632.000.000,00	
Terlaksananya penanganan sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia (Unit)	1			2	950.000.000,00	1	110.000.000,00	1	160.000.000,00	1	160.000.000,00	4	632.000.000,00	
	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	0			1		1		1		1		1		
	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota (Dokumen)	0			1		1		1		1		1		
2.11.11.1.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional						50.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		100.000.000,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia (Unit)	1	0	0	2	50.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	4	100.000.000,00	
2.11.11.1.01.0009 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi						35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	
Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	0	0	0	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	
2.11.11.1.01.0014 - Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota						865.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		497.000.000,00	
Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota (Dokumen)	0	1	10.121.048	1	865.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	497.000.000,00	
3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						2.319.789.000,00		3.401.700.000,00		3.401.700.000,00		3.401.700.000,00		6.989.000.000,00	
3.28.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.013.000.000,00		1.229.000.000,00		1.229.000.000,00		1.229.000.000,00		1.229.000.000,00	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	0	84	37.560.300	84,44	1.013.000.000,00	84,63	1.229.000.000,00	84,86	1.229.000.000,00	85,08	1.229.000.000,00	85,30	1.229.000.000,00	2.11.3.28.0.00.10.0002 - UPTD KPHP Unit 1 Karimun
3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	21.517.800		47.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1	47.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0		1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0		1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0		1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0		1		1		1		1		1			
3.28.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi					1.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0	1	1.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						2.500.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0	1	2.500.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0	0	1	1.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	16.476.800	1	15.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
3.28.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu						2.500.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	0	0	1	2.500.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.28.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	5.041.000	1	25.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	
3.28.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0	0		25.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Tersedianya Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0			0	25.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0			1		1		1		1		1		
3.28.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel						0,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	0	0	0	0,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	
3.28.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	25.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	
3.28.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00	
Tersedianya laporan jasa penunjang perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	16.042.500	1	17.000.000,00	1	17.000.000,00	1	17.000.000,00	1	17.000.000,00	1	17.000.000,00	
3.28.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	16.042.500	1	17.000.000,00	1	17.000.000,00	1	17.000.000,00	1	17.000.000,00	1	17.000.000,00	
3.28.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0	0		55.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00	
Terpeliharanya barang milik daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0			10	55.000.000,00	10	65.000.000,00	10	65.000.000,00	10	65.000.000,00	10	65.000.000,00	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0			2		2		2		2		2		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0			1		1		1		1		1		

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.28.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	0	0	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	
3.28.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0	0	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	
3.28.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						25.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	1	25.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	
Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	0	84,25	25.596.000,00	84,44	1.013.000.000,00	84,65	1.229.000.000,00	84,87	1.229.000.000,00	85,08	1.229.000.000,00	85,30	1.229.000.000,00	2.113.280.000.10.0003 - UPTD KPPIP Unit II Batam
3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	19.065.600		47.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0			1	47.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1			1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0			1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1			1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1			1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0			1		1		1		1		1		
3.28.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0	1	1.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						2.500.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	639.600	1	2.500.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0	0	1	1.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	13.457.500	1	15.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
3.28.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu						2.500.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	0	0	1	2.500.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	4.968.500	1	25.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	
3.28.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0	0		25.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Tersedianya Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0			1	25.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0		0			1		1		1		1		
3.28.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel						0,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	0	0	0	0,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	
3.28.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	25.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	
3.28.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00	
Tersedianya laporan jasa penunjang perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	6.530.400	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	
3.28.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	6.530.400	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	
3.28.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0	0		55.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00	
Terselenggaranya barang milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0			1	55.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0			2		2		2		2		2		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0			10		10		10		10		10		
3.28.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	0	0	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	
3.28.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0	0	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	
3.28.01.1.09.0009 - Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						25.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	1	25.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	
Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	0	84,25	22.793.624,00	84,44	1.013.000.000,00	84,64	1.229.000.000,00	84,86	1.229.000.000,00	85,08	1.229.000.000,00	85,30	1.229.000.000,00	2.111.328.000.10.0004 - UPTD KPPIP Unit III Lingga
3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	19.293.500		47.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1			1	47.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0			1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0			1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1			1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1			1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0			1		1		1		1		1		
3.28.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0	1	1.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					2.500.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	2.562.800	1	2.500.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					1.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0	0	1	1.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					15.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	11.730.700	1	15.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
3.28.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu					2.500.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	0	0	1	2.500.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					25.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	5.000.000	1	25.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	
3.28.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0	0	25.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00
Tersedianya Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0		0	25.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0			1	1		1		1		1		1	
3.28.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel					0,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	0	0	0	0,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	
3.28.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	25.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	
3.28.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00	
Tersedianya laporan jasa penunjang perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	3.500.124	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	
3.28.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	3.500.124	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	
3.28.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0	0		180.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00	
Terpeliharanya barang milik daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0			10	180.000.000,00	10	65.000.000,00	10	65.000.000,00	10	65.000.000,00	10	65.000.000,00	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0			1		1		1		1		1		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0			2		2		2		2		2		
3.28.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	0	0	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	
3.28.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0	0	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	
3.28.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						150.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	1	150.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	0	84,25	47.876.465,00	84,44	1.013.000.000,00	84,64	1.229.000.000,00	84,86	1.229.000.000,00	85,07	1.229.000.000,00	85,30	1.229.000.000,00	2.11.3.28.0.00.10.0005 - UPTD KPHP Unit IV Bantam- Tanjungpinang
3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	24.749.150		47.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0			1	47.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1			1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik-Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0			1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1			1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0			1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0			1		1		1		1		1		
3.28.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik-Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0	1	1.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						2.500.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0	1	2.500.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0	0	1	1.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	20.250.000	1	15.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
3.28.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu						2.500.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	0	0	1	2.500.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.28.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	
Terlaksunanya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	4.499.150	1	25.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	
3.28.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0	0		25.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Tersedianya Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0			0	25.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0			1		1		1		1		1		
3.28.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel						0,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	0	0	0	0,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	
3.28.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	25.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	
3.28.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00	
Tersedianya laporan jasa penunjang perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kommunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	23.127.315	1	24.000.000,00	1	24.000.000,00	1	24.000.000,00	1	24.000.000,00	1	24.000.000,00	
3.28.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kommunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	23.127.315	1	24.000.000,00	1	24.000.000,00	1	24.000.000,00	1	24.000.000,00	1	24.000.000,00	
3.28.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0	0		55.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00	
Terpeliharanya barang milik daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0			2	55.000.000,00	2	65.000.000,00	2	65.000.000,00	2	65.000.000,00	2	65.000.000,00	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0			10		10		10		10		10		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0			1		1		1		1		1		

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.28.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	0	0	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	
3.28.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0	0	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	
3.28.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						25.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	1	25.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	
Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	0	84,25	53.072.000,00	84,44	1.013.000.000,00	84,64	1.229.000.000,00	84,87	1.229.000.000,00	85,08	1.229.000.000,00	85,30	1.229.000.000,00	2.113.280.000.10.0006 - UPTD KP/PP Unit V Natuna
3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	21203000		47.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1			1	47.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1			1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1			1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0			1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1			1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0			1		1		1		1		1		
3.28.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0	1	1.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						2.500.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	3.134.800	1	2.500.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0	0	1	1.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	11.321.600	1	15.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
3.28.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu						2.500.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	1.746.600	1	2.500.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	5.000.000	1	25.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	
3.28.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0	0		25.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Tersedianya Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0			0	25.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0			1		1		1		1		1		
3.28.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel						0,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	0	0	0	0,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	
3.28.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	25.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	
3.28.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2	31.869.000		32.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00	
Tersedianya laporan jasa penunjang perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1			1	32.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1			1		1		1		1		1		
3.28.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	9.869.000	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
3.28.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						22.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	22.000.000	1	22.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	
3.28.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0	0		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Terpeliharanya barang milik daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0			2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0			10		10		10		10		10		
3.28.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	0	0	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	
3.28.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0	0	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	
Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	0	84,25	104.613.100,00	84,43	1.013.000.000,00	84,64	1.229.000.000,00	84,88	1.229.000.000,00	85,07	1.229.000.000,00	85,29	1.229.000.000,00	2.11.3.28.0.00.10.0007 - UPTD KPMP Unit VI Kepulauan Anambas
3.28.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	13.048.100		47.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0			1	47.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1			1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1			1		1		1		1		1		

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0			1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0			1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0			1		1		1		1		1		
3.28.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0	1	1.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						2.500.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0	1	2.500.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0	0	1	1.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	8.120.100	1	15.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
3.28.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu						2.500.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	0	0	1	2.500.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	
Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	4.928.000	1	25.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	
3.28.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0	0		25.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Tersedianya Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0			0	25.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0			1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.28.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel						0,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	0	0	0	0,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	
3.28.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	25.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	
3.28.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2	91.565.000		92.000.000,00		92.000.000,00		92.000.000,00		92.000.000,00		92.000.000,00	
Tersedianya laporan jasa penunjang perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1			1	92.000.000,00	1	92.000.000,00	1	92.000.000,00	1	92.000.000,00	1	92.000.000,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1			1		1		1		1		1		
3.28.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	11.565.000	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	
3.28.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	80.000.000	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	
3.28.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0	0		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Terpeliharanya barang milik daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0			2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0			10		10		10		10		10		
3.28.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	0	0	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	
3.28.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0	0	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	2.11.3.28.0.00.10.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					926.789.000,00		1.807.700.000,00		1.807.700.000,00		1.807.700.000,00		5.185.000.000,00		
Menurunnya Kerusakan hutan	Persentase tutupan lahan berhutan di Wilayah Prov. Kepri yang dipertahankan (%)	100	100	444.827.600	100	926.789.000,00	100	1.807.700.000,00	100	1.807.700.000,00	100	1.807.700.000,00	100	5.185.000.000,00	
3.28.03.1.01 - Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi			-	-	100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		300.000.000,00		
Persentase ketersediaan dokumen pengolahan rencana tata hutan KPH	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi (Dokumen)	0		1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	300.000.000,00		
	Dokumen RKTP yang disahkan (Dokumen)	0		1		1		1		1		1			
3.28.03.1.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukkan Hutan					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordnasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi (Dokumen)	0	0	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	150.000.000,00	
3.28.03.1.01.0005 - Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP)					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya penyusunan dan penetapan RKTP	Dokumen RKTP yang disahkan (Dokumen)	0	0	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	150.000.000,00	
3.28.03.1.03 - Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung			2	194.839.900		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		300.000.000,00	
Tersedianya dokumen atau laporan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung (Dokumen)	1			1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	300.000.000,00	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi (Dokumen)	1			1		1		1		1		1		
3.28.03.1.03.0013 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi						50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		150.000.000,00	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi (Dokumen)	1	1	183.751.600	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	150.000.000,00	
3.28.03.1.03.0015 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung						50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		150.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung (Dokumen)	1	1	11.088.300	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	150.000.000,00	
3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			1	164.287.700		216.274.600,00		380.000.000,00		380.000.000,00		380.000.000,00		1.030.000.000,00	
Terlaksananya rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara	Luas Areal Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (Ha)	0			1	216.274.600,00	1	380.000.000,00	1	380.000.000,00	1	380.000.000,00	3	1.030.000.000,00	
	Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara (Ha)	0			0		3		3		3		7		
	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan (Laporan)	0			1		1		1		1		1		
	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara (Ha)	5			1		1		1		1		3		
	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTrnRL) (Dokumen)	0			1		1		1		1		1		
3.28.03.1.04.0001 - Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTrnRL)						35.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00	
Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTrnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTrnRL) (Dokumen)	0	0	0	1	35.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	
3.28.03.1.04.0004 - Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara						75.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		240.000.000,00	
Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara (Ha)	5	1	84.639.700	1	75.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	3	240.000.000,00	
3.28.03.1.04.0008 - Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan						35.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		240.000.000,00	
Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan (Laporan)	0	1	79.648.000	1	35.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	240.000.000,00	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.28.03.1.04.0009 - Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan						71.274.600,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		240.000.000,00	
Terlaksananya Rehabilitasi Mangrove Di Luar Kawasan Hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (Ha)	0	0	0	1	71.274.600,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	3	240.000.000,00	
3.28.03.1.04.0011 - Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2						0,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		210.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Tanaman RHL pasca P2	Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara (Ha)	0	0	0	0	0,00	3	90.000.000,00	3	90.000.000,00	3	90.000.000,00	7	210.000.000,00	
3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			80	43.000.000		43.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		335.000.000,00	
Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan produksi	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan (Ha)	0			0	43.000.000,00	50	135.000.000,00	50	135.000.000,00	50	135.000.000,00	150	335.000.000,00	
	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun (Laporan)				1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perindungan Hutan (Dokumen)	0			0		1		1		1		1		
3.28.03.1.05.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perindungan Hutan						0,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perindungan Hutan (Dokumen)	0	0	0	0	0,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	
3.28.03.1.05.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Pemangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan						43.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		150.000.000,00	
Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun (Laporan)	0	1	43.000.000	1	43.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	150.000.000,00	
3.28.03.1.05.0007 - Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan						0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		150.000.000,00	
Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan (Ha)	0	0	0	0	0,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	150	150.000.000,00	
3.28.03.1.07 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun			13	42.700.000		42.700.000,00		42.700.000,00		42.700.000,00		42.700.000,00		100.000.000,00	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN-OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Terlaksananya pengawasan unit manajemen Pengelolaan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi Kurang dari 6000 m3/Tahun	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi (Laporan)	1			1	42.700.000,00	1	42.700.000,00	1	42.700.000,00	1	42.700.000,00	1	100.000.000,00	
3.28.03.1.07.0004 - Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi						42.700.000,00		42.700.000,00		42.700.000,00		42.700.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi (Laporan)	1	1	42.700.000	1	42.700.000,00	1	42.700.000,00	1	42.700.000,00	1	42.700.000,00	1	100.000.000,00	
Menurunkan Kerusakan hutan	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar (%)	20,00	22,50	33.559.000,00	24,00	926.789.000,00	25,50	1.807.700.000,00	27,50	1.807.700.000,00	29,50	1.807.700.000,00	32,50	5.185.000.000,00	2.11.3.28.0.00.10.0002 - UPTD KPMP Unit I Karimun
3.28.03.1.01 - Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi			1	4.059.000		4.059.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00	
Tersedianya dokumen pengelolaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun (Dokumen)	0			0	4.059.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	
	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara (Unit)	0			4		20		20		20		20		
3.28.03.1.01.0001 - Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan						0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Tersusunnya Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun (Dokumen)	0	0	0	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
3.28.03.1.01.0006 - Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH						4.059.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Terpeliharanya Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara (Unit)	0	1	4.059.000	4	4.059.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	
3.28.03.1.02 - Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			0	0		0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Tersedianya Dokumen rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun (Dokumen)	0			0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
3.28.03.1.02.0001 - Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan						0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun (Dokumen)	0	0	0	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			14	29.500.000		38.155.668,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		450.000.000,00	
Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan produksi	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan (Ha)	0			21	38.155.668,00	50	105.000.000,00	50	105.000.000,00	50	105.000.000,00	200	450.000.000,00	
	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (Dokumen)	0			0		1		1		1		1		
	Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Operasi)	0			1		3		3		3		15		
3.28.03.1.05.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan						0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (Dokumen)	0	1	29.500.000	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	100.000.000,00	
3.28.03.1.05.0006 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan						16.500.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		150.000.000,00	
Terlaksananya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Operasi)	0	0	0	1	16.500.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	15	150.000.000,00	
3.28.03.1.05.0007 - Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan						21.655.668,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		200.000.000,00	
Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan (Ha)	0	0	0	21	21.655.668,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	200	200.000.000,00	
Memurninya Kerusakan hutan	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar (%)	16,67	17	45.432.785	21,67	926.789.000,00	29,00	1.807.700.000,00	32,00	1.807.700.000,00	33,83	1.807.700.000,00	34,90	5.185.000.000,00	2.11.3.28.0.00.10.0003 - UPTD KPHP Unit II Batam
3.28.03.1.01 - Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi			1	15.932.785		15.932.785,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00	
Tersedianya dokumen pengelolaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara (Unit)	0			16	15.932.785,00	20	45.000.000,00	20	45.000.000,00	20	45.000.000,00	20	45.000.000,00	
	Jumlah Rancangan Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun (Dokumen)	0			0		1		1		1		1		

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.28.03.1.01.0001 - Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan						0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Tersusunnya Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun (Dokumen)	0	0	0	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
3.28.03.1.01.0006 - Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH						15.932.785,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Terpeliharanya Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara (Unit)	0	5	15.932.785	16	15.932.785,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	
3.28.03.1.02 - Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			0	0		0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Tersedianya Dokumen rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun (Dokumen)	0			0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
3.28.03.1.02.0001 - Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan						0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun (Dokumen)	0	0	0	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			13	29.500.000		46.425.313,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		450.000.000,00	
Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan produksi	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (Dokumen)	0			0	46.425.313,00	1	105.000.000,00	1	105.000.000,00	1	105.000.000,00	1	450.000.000,00	
	Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Operasi)	0			2		3		3		3		15		
	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan (Ha)	11			30		50		50		50		200		
3.28.03.1.05.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan						0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (Dokumen)	0	1	29.500.000	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	100.000.000,00	
3.28.03.1.05.0006 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan						16.500.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		150.000.000,00	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Terkaksananya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Operasi)	0	0	0	2	16.500.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	15	150.000.000,00	
3.28.03.1.05.0007 - Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan						29.925.313,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		200.000.000,00	
Tercagahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan (Ha)	11	0	0	30	29.925.313,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	200	200.000.000,00	
Memurninya Kerusakan hutan	Persentase area yang dilindungi dari perubahan dan pencabangan liar (%)	9,78	11,22	34.667.597,00	14,98	926.789.000,00	19,00	1.807.700.000,00	21,00	1.807.700.000,00	28,11	1.807.700.000,00	32,78	5.185.000.000,00	2.113.280.000.10.0004 - UPTD KPMP Unit III Lingga
3.28.03.1.01 - Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi			1	5.167.597		5.167.597,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00	
Tersedianya dokumen pengelolaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara (Unit)	0			5	5.167.597,00	20	45.000.000,00	20	45.000.000,00	20	45.000.000,00	20	45.000.000,00	
	Jumlah Rancangan Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun (Dokumen)	0			0		1		1		1		1		
3.28.03.1.01.0001 - Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan						0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Tersusunnya Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun (Dokumen)	0	0	0	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
3.28.03.1.01.0006 - Penyelenggaraan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH						5.167.597,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Terpeliharanya Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara (Unit)	0	2	5.167.597	5	5.167.597,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	
3.28.03.1.02 - Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			0	0		0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Tersedianya Dokumen rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun (Dokumen)	0			0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
3.28.03.1.02.0001 - Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan						0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun (Dokumen)	0	0	0	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			13	29.500.000		90.881.941,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		450.000.000,00	
Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan produksi	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan (Ha)	11			72	90.881.941,00	50	105.000.000,00	50	105.000.000,00	50	105.000.000,00	200	450.000.000,00	
	Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Operasi)	0			2		3		3		3		15		
	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (Dokumen)	0			0		1		1		1		1		
3.28.03.1.05.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan						0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (Dokumen)	0	1	29.500.000	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	100.000.000,00	
3.28.03.1.05.0006 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan						18.500.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		150.000.000,00	
Terlaksananya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Operasi)	0	0	0	2	18.500.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	15	150.000.000,00	
3.28.03.1.05.0007 - Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan						72.381.941,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		200.000.000,00	2.111.328.0.00.10.0005 - UPTD KPHIP Unit IV Bintan- Tanjungpinang
Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan (Ha)	11	0	0	72	72.381.941,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	200	200.000.000,00	
Memurninya Kerusakan hutan	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar (%)	13,00	17,66	39.924.694,00	21,80	926.789.000,00	26,24	1.807.700.000,00	27,92	1.807.700.000,00	29,44	1.807.700.000,00	33,32	5.185.000.000,00	
3.28.03.1.01 - Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi			1	10.424.694		10.424.694,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00	
Tersedianya dokumen pengelolaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara (Unit)	0			10	10.424.694,00	20	45.000.000,00	20	45.000.000,00	20	45.000.000,00	20	45.000.000,00	
	Jumlah Rancangan Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun (Dokumen)	0			0		1		1		1		1		
3.28.03.1.01.0001 - Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan						0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tersusunnya Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun (Dokumen)	0	0	0	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
3.28.03.1.01.0006 - Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH						10.424.694,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Terpeliharanya Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara (Unit)	0	3	10.424.694	10	10.424.694,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	
3.28.03.1.02 - Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			0	0		0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Tersedianya Dokumen rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun (Dokumen)	0			0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
3.28.03.1.02.0001 - Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan						0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun (Dokumen)	0	0	0	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			13	29.500.000		52.167.990,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		450.000.000,00	
Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan produksi	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan (Ha)	11			35	52.167.990,00	50	105.000.000,00	50	105.000.000,00	50	105.000.000,00	200	450.000.000,00	
	Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Operasi)	0			2		3		3		3		15		
	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (Dokumen)	0			0		1		1		1		1		
3.28.03.1.05.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan						0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (Dokumen)	0	1	29.500.000	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	100.000.000,00	
3.28.03.1.05.0006 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan						17.500.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		150.000.000,00	
Terlaksananya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Operasi)	0	0	0	2	17.500.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	15	150.000.000,00	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.28.03.1.05.0007 - Pencegahan dan Pembenartasan Kerusakan Kawasan Hutan						34.667.990,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		200.000.000,00	
Teregalnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan (Ha)	11	0	0	35	34.667.990,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	200	200.000.000,00	
Memerumnya Kerusakan hutan	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar (%)	13,33	15,56	41.917.300,00	18,89	926.789.000,00	23,33	1.807.700.000,00	27,11	1.807.700.000,00	28,11	1.807.700.000,00	31,69	5.185.000.000,00	2.11.3.28.0.00.10.0006 - UPTD KPHP Unit V Natuna
3.28.03.1.01 - Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi			1	12.417.300		12.417.300,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00	
Tersedianya dokumen pengelolaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara (Unit)	0			8	12.417.300,00	12	45.000.000,00	12	45.000.000,00	12	45.000.000,00	12	45.000.000,00	
	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun (Dokumen)	0			0		1		1		1		1		
3.28.03.1.01.0001 - Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan						0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Tersusunnya Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun (Dokumen)	0	0	0	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
3.28.03.1.01.0006 - Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH						12.417.300,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Terpeliharanya Sarana Prasarana operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara (Unit)	0	2	12.417.300	8	12.417.300,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	
3.28.03.1.02 - Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kekal pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			0	0		0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Tersedianya Dokumen rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun (Dokumen)	0			0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
3.28.03.1.02.0001 - Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan						0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun (Dokumen)	0	0	0	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			14	29.500.000		93.812.165,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		450.000.000,00	
Tertaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan produksi	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan (Ha)	11			74	93.812.165,00	50	105.000.000,00	50	105.000.000,00	50	105.000.000,00	200	450.000.000,00	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN-OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (Dokumen)	0			0		1		1		1		1		
	Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Operasi)	0			2		3		3		3		15		
3.28.03.1.05.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan						0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (Dokumen)	0	1	29.500.000	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	100.000.000,00	
3.28.03.1.05.0006 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan						19.500.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		150.000.000,00	
Terlaksananya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Operasi)	0	0	0	2	19.500.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	15	150.000.000,00	
3.28.03.1.05.0007 - Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan						74.312.165,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		200.000.000,00	
Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan (Ha)	11	0	0	74	74.312.165,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	200	200.000.000,00	
Memurahnya Kerusakan hutan	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar (%)	17,75	22,80	51.313.024,00	28,60	926.789.000,00	31,75	1.807.700.000,00	35,25	1.807.700.000,00	36,95	1.807.700.000,00	39,88	5.185.000.000,00	2.111.328.000.10.0007 - UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas
3.28.03.1.01 - Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi			1	21.813.024		21.813.024,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00	
Tersedianya dokumen pengelolaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun (Dokumen)	0			0	21.813.024,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	
	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara (Unit)	0			22		20		20		20		20		
3.28.03.1.01.0001 - Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan						0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Tersusunnya Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun (Dokumen)	0	0	0	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
3.28.03.1.01.0006 - Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH						21.813.024,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Terpeliharanya Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara (Unit)	0	9	21.813.024	22	21.813.024,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	
3.28.03.1.02 - Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			0	0		0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Tersedianya Dokumen rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun (Dokumen)	0			0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
3.28.03.1.02.0001 - Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan						0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun (Dokumen)	0	0	0	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			13	29.500.000		33.556.923,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		450.000.000,00	
Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan produksi	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (Dokumen)	0			0	33.556.923,00	1	105.000.000,00	1	105.000.000,00	1	105.000.000,00	1	450.000.000,00	
	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan (Ha)	11			17		50		50		50		200		
	Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Operasi)	0			2		3		3		3		15		
3.28.03.1.05.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan						0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (Dokumen)	0	1	29.500.000	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	100.000.000,00	
3.28.03.1.05.0006 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan						16.500.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		150.000.000,00	
Terlaksananya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Operasi)	0	0	0	2	16.500.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	15	150.000.000,00	
3.28.03.1.05.0007 - Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan						17.056.923,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		200.000.000,00	
Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan (Ha)	11	0	0	17	17.056.923,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	200	200.000.000,00	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA						140.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00	
Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	Persentase kawasan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang terkelola dengan baik (%)	100	100	0	100	140.000.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	2.11.3.28.0.00.10.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.04.1.03 - Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam			0	0		140.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00	
Terlaksananya pengelolaan kawasan sumber daya alam hayati dan ekosistem	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan (Orang)	0			8	140.000.000,00	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00	
	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola (Ha)	0			2		1		1		1		1		
	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani (Ha)	0			2		2		2		2		2		
3.28.04.1.03.0004 - Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah						50.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	
Terlaksananya Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani (Ha)	0	0	0	2	50.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	
3.28.04.1.03.0005 - Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi						40.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Terlaksananya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan (Orang)	0	0	0	8	40.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	
3.28.04.1.03.0006 - Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi						50.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Terlaksananya Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola (Ha)	0	0	0	2	50.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	
3.28.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN						190.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		385.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dibidang Kehutanan	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat Hutan (SBM/Milyar Rupiah)	1,116	1,18	100.000.000,00	1,185	190.000.000,00	1,192	175.000.000,00	1,196	175.000.000,00	1,197	175.000.000,00	1,201	385.000.000,00	2.11.3.28.0.00.10.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.28.05.1.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			24	100.000.000		190.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		385.000.000,00	
Terselenggaranya penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya (Orang)	0			0	190.000.000,00	5	175.000.000,00	5	175.000.000,00	5	175.000.000,00	5	385.000.000,00	
	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial (Hektar)	100			100		100		100		100		100		
	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya (Unit)	0			3		2		2		2		5		
	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan (Kelompok)	3			3		2		2		2		7		
3.28.05.1.01.0002 - Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan						80.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		210.000.000,00	
Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan (Kelompok)	3	4	100.000.000	3	80.000.000,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00	7	210.000.000,00	
3.28.05.1.01.0007 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan						0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkatkan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya (Orang)	0	0	0	0	0,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	
3.28.05.1.01.0008 - Penyiapan Perhutanan Sosial						50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial (Hektar)	100	100	-	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	
3.28.05.1.01.0009 - Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial						60.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya (Unit)	0	0	0	3	60.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	5	100.000.000,00	
3.28.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)						50.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00	
Meningkatnya Kelestarian dan Fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Kepulauan Riau Yang Terkelola dengan baik (%)	1,71	1,71	-	2,56	50.000.000,00	2,56	110.000.000,00	4,27	110.000.000,00	5,98	110.000.000,00	6,84	110.000.000,00	2.11.3.28.0.00.10.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.06.1.01 - Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			2	-		50.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00	

DLHK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Terlaksananya pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS (Dokumen)	0			1	50.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS (Orang)	0			0		4		4		4		4		
	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS (Lembaga)	0			0		1		1		1		1		
	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan (Dokumen)	0			0		1		1		1		1		
						0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
3.28.06.1.01.0004 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS						0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS (Orang)	0	0	0	0	0,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	
3.28.06.1.01.0005 - Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS						0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Terlaksananya Pembentukan dan Pengembangan Forum Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS (Lembaga)	0	0	0	0	0,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	
3.28.06.1.01.0007 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah						0,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	
Terusunnya dan ditetapkan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan (Dokumen)	0	0	0	0	0,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	
3.28.06.1.01.0008 - Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS						50.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	
Meningkatnya Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS (Dokumen)	0	0	0	1	50.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	

4.1.2 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja. Program Prioritas Pembangunan Daerah yang dilaksanakan DLHK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2. Program Pengelolaan Persampahan
3. Program Pengelolaan Hutan

Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah di atas meliputi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
2. Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
3. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
4. Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
5. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
6. Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota
7. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
8. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
9. Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan
10. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
11. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangguhan Kebakaran Hutan dan Lahan
12. Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan

Tabel 4.3

**Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah**

No	Program Prioritas	Indikator <i>Outcome</i>	Kegiatan /Sub kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
1	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		
			2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
			2.11.03.1.01.0008 - Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	
			2.11.03.1.01.0009 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
			2.11.03.1.01.0011 - Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	
2	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya Tata Kelola Persampahan		
			2.11.11.1.01 - Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	
			2.11.11.1.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	
			2.11.11.1.01.0014 - Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	
3	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Menurunnya Kerusakan hutan		
			3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	
			3.28.03.1.04.0004 - Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	
			3.28.03.1.04.0009 - Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	
			3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	

No	Program Prioritas	Indikator Outcome	Kegiatan /Sub kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
			3.28.03.1.05.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	
			3.28.03.1.05.0007 - Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	

4.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra DLHK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra DLHK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi. IKU berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030.

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra DLHK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah tercantum pada tabel berikut:

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama DLHK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah	Indeks	75,46	75,67	75,88	76,09	76,30	76,52	

4.3. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Target kinerja penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang tercantum pada tabel berikut.

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Kunci DLHK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
1	Persentase ketersediaan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Lokasi Air Baku yang di Analisa	positif	%	46,67	46,67	53,33	60,00	73,33	86,67	100	
3	Persentase pengawasan terhadap izin pengelolaan limbah B3	positif	%	50,00	50,00	53,57	57,14	67,86	78,57	100	
4	Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	positif	%	9,76	9,76	12,20	14,63	17,07	21,95	24,39	
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	positif	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
6	Persentase kepatuhan terhadap rekomendasi lingkungan kepada unit usaha	positif	%	12,20	21,95	32,93	32,93	53,66	53,66	100,00	
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	positif	Indeks	0	84,25	84,45	84,65	84,87	85,07	85,30	
8	Persentase Lembaga/Kelompok Masyarakat yang Meningkatkan Kapasitasnya Bidang Lingkungan Hidup	positif	%	6,19	6,19	6,64	6,64	7,08	7,52	7,52	
9	Persentase Lembaga Masyarakat atau Dunia Usaha Yang dinilai kinerjanya dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	positif	%	53,19	57,45	59,57	68,09	78,72	91,49	100	
10	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	positif	Indeks	0	80,29	80,43	80,47	80,51	80,51	80,51	
11	Indeks Kepuasan Masyarakat	positif	Indeks	83,82	84,25	84,44	84,65	84,87	85,08	85,30	
12	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	positif	%	23,33	30,49	41,46	50,00	63,41	79,27	91,46	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN										
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	positif	Indeks	0	84,25	84,43	84,64	84,88	85,07	85,29	
14	Indeks Kepuasan Masyarakat	positif	Indeks	0	84,25	84,44	84,64	84,86	85,07	85,30	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Indeks Kepuasan Masyarakat	positif	Indeks	0	84,25	84,44	84,64	84,86	85,08	85,30	
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	positif	Indeks	0	84,25	84,44	84,64	84,87	85,08	85,30	
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	positif	Indeks	0	84,25	84,44	84,65	84,87	85,08	85,30	
18	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat Hutan	positif	SBM/Milyar Rupiah	1,116	1,175	1,185	1,192	1,196	1,197	1,201	
19	Indeks Kepuasan Masyarakat	positif	Indeks	0	84,25	84,44	84,63	84,86	85,08	85,30	
20	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar	positif	%	13,00	17,66	21,80	26,24	27,92	29,44	33,32	
21	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar	positif	%	13,33	15,56	18,89	23,33	27,11	28,11	31,69	
22	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar	positif	%	16,67	17,00	21,67	29,00	32,00	33,83	34,90	
23	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar	positif	%	17,75	22,80	28,60	31,75	35,25	36,95	39,88	
24	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar	positif	%	20,00	22,50	24,00	25,50	27,50	29,50	32,50	
25	Persentase area yang dilindungi dari perambahan dan penebangan liar	positif	%	9,78	11,22	14,98	19,00	21,00	28,11	32,78	
26	Persentase Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Kepulauan Riau Yang Terkelola dengan baik	positif	%	1,71	1,71	2,56	2,56	4,27	5,98	6,84	
27	Persentase kawasan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang terkelola dengan baik	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
28	Persentase tutupan lahan berhutan di Wilayah Prov. Kepri yang dipertahankan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
29	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	positif	Ha	500,48	510,49	520,70	531,11	541,74	552,57	563,62	

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan Substansial

Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 merupakan turunan dari Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029, dengan visi pembangunan daerah yaitu **“Kepulauan Riau Maju, Makmur dan Merata”**. Renstra ini disusun sebagai pedoman strategis bagi DLHK Provinsi Kepulauan Riau dalam merumuskan arah kebijakan, sasaran, serta program dan kegiatan yang mendukung terwujudnya visi daerah secara efektif dan terukur.

5.2. Kesimpulan Sesuai Kaidah Pelaksanaan

Sebagai pedoman pelaksanaan, ditetapkan beberapa kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

1. Renstra DLHK Provinsi Kepulauan Riau adalah dokumen rencana pembangunan lima tahunan yang menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) DLHK Provinsi Kepulauan Riau. Dokumen ini digunakan untuk pengajuan pendanaan melalui RAPBD periode 2025-2029, dengan tahun 2030 berfungsi sebagai masa transisi agar seluruh program dan kegiatan dapat berjalan secara berkelanjutan, transparan, dan akuntabel.
2. Dokumen Renstra DLHK Provinsi Kepulauan Riau dijadikan pedoman untuk menetapkan perjanjian kinerja, serta menyusun laporan kinerja DLHK Provinsi Kepulauan Riau pada periode 2025–2029.
3. Bidang-bidang pada DLHK Provinsi Kepulauan Riau diharapkan mendukung pencapaian target-target indikator kinerja pada dokumen Renstra, dan melaksanakan program serta kegiatan yang tercantum pada Renstra DLHK Provinsi Kepulauan Riau dengan sebaik-baiknya.
4. Jika terdapat perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional maupun kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Renstra DLHK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 dapat disesuaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Masa berlaku Rencana Strategis DLHK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah sesuai dengan masa berlaku RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029. Renstra DLHK Provinsi Kepulauan Riau dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja DLHK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2030.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan

Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan oleh DLHK Provinsi Kepulauan Riau, sekaligus menjamin tercapainya target Indikator Kinerja pada dokumen Renstra DLHK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 dan tahun 2030 sebagai masa transisi, diperlukan upaya pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan, serta hasil dari program dan kegiatan yang dijalankan.

Pengendalian dan pengawasan terhadap implementasi Renstra dilakukan langsung oleh Kepala DLHK Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pelaksanaannya, Kepala Badan dibantu oleh seluruh jajaran di lingkungan instansi, bekerja secara kolektif untuk memastikan program-program berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diharapkan. Pendekatan ini dirancang untuk menciptakan sinergi antara perencanaan strategis dan pelaksanaan teknis di lapangan.

Dokumen ini juga bersifat dinamis, memungkinkan adanya revisi dan penyempurnaan guna mengatasi berbagai kekurangan yang mungkin muncul dalam perencanaan pembangunan. Renstra ini tidak hanya menjadi panduan kerja, tetapi juga alat evaluasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Semua target yang telah dirumuskan dalam Renstra ini dapat tercapai dengan dukungan penuh dari berbagai pihak terkait. Kolaborasi lintas sektor dengan unsur pentahelix menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Sebagai penutup, dokumen renstra ini diharapkan dapat menjadi landasan kokoh dalam penyusunan perencanaan strategis DLHK Provinsi Kepulauan Riau. Melalui arahan dan tujuan yang jelas, renstra ini akan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dukungan dan kerja sama semua pihak sangat diperlukan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang telah dirancang demi kemajuan Provinsi Kepulauan Riau.